

60

PAMERAN



LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2002

**ANALISIS MODEL MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)
DI TINGKAT SEKOLAH DASAR DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
PENGELOLAAN SEKOLAH YANG OTONOM**

Peneliti:

Dra. TUTI BUDIRAHAYU, MSi

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2002

S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 4879/J03/PG/2001

Tanggal 7 Juni 2002

Nomor Urut: 42

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2002

EDUCATIONAL SOCIOLOGY



LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2002

KKB
KK-2B
306.432
Bud
a

**ANALISIS MODEL MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)
DI TINGKAT SEKOLAH DASAR DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
PENGELOLAAN SEKOLAH YANG OTONOM**

Peneliti:

Dra.TUTI BUDIRAHAYU, MSi



3000125033141

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2002
S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 4879/J03/PG/2001
Tanggal 7 Juni 2002
Nomor Urut: 42

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2002



ANALISIS MODEL MANAJEMEN BERBASIS PERKULIAHAN (MBS)
DI TINGKAT SEKOLAH DASAR DALAM UPAYA BERTINGKAT
SANGAT DI SAAT SEKOLAH YANG OTONOM



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

3000125033141

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. Judul Penelitian	:	Analisis Model Manajemen peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Menuju Pengelolaan Sekolah yang Otonom
a. Macam Penelitian	:	<input type="checkbox"/> Fundamental <input type="checkbox"/> Terapan
b. Kategori Penelitian	:	<input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input checked="" type="checkbox"/> III
2. Kepala Proyek Penelitian	:	
a. Nama lengkap dan Gelar	:	Dra. Tuti Budirahayu, Msi.
b. Jenis Kelamin	:	Perempuan
c. Pangkat/Golongan dan NIP	:	Penata/IIIC/132014465
d. Jabatan sekarang	:	Lektor
e. Fakultas/Jurusan	:	ISIP/Sosiologi
f. universitas	:	Airlangga
g. Bidang ilmu yang diteliti	:	Sosiologi Pendidikan
3. Jumlah tim peneliti	:	--
4. Lokasi penelitian	:	Surabaya, Sidoarjo, Gresik
5. Kerja sama dengan instansi lain	:	
a. Nama instansi	:	-
b. Alamat	:	-
6. Jangka waktu penelitian	:	5,5 bulan
7. Biaya yang diperlukan	:	Rp. 4.000.000,-
8. Seminar hasil penelitian	:	
a. Dilaksanakan tanggal	:	29 Nopember 2002
b. Hasil penelitian	:	() Baik sekali (<input checked="" type="checkbox"/>) Baik () Sedang () Kurang

Surabaya, Desember 2002

Mengetahui/Mengesahkan

a.n. Rektor

Ketua Lembaga Penelitian,




 Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
 NIP 130 701 125



Daftar Isi

	Halaman
Lembar Identitas dan Pengesahan	I
Daftar Isi	II
Daftar Tabel	III
Bab I Pendahuluan	1
I.1. Latar Belakang Permasalahan	1
I.2. Rumusan Masalah	5
Bab II Tinjauan Pustaka	6
Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
III.1. Tujuan Penelitian	17
III.2. Manfaat Penelitian	17
Bab IV Metode Penelitian	19
Bab V Hasil dan Pembahasan	21
V.1. Hasil Penelitian	21
V.1.1. Karakteristik Subyek Penelitian	21
V.1.2. Kronologis Pelaksanaan MPMBS di Masing-masing Sekolah	23
V.1.3. Pembentukan dan Peran Komite Sekolah	27
V.1.4. Mekanisme Pendanaan untuk Penyelenggaraan Aktivitas Belajar-Mengajar di Sekolah	37
V.1.5. Manfaat yang Diperoleh Sekolah dengan Diterapkannya Program MPMBS	44
V.2. Pembahasan	53
Bab VI Kesimpulan dan Saran	56
Daftar Pustaka	59
Lampiran	60

DAFTAR TABEL

NOMOR	JUDUL	HALAMAN
1	Dimensi-dimensi Perubahan Pola Manajemen Pendidikan	9
2	Variasi Kronologis Sekolah dalam Menjalankan Program MPMBS	27
3	Variasi Pembentukan dan Peran Komite Sekolah	35
4	Variasi Mekanisme Pendanaan Sekolah	42
5	Hal-hal Positif yang Diperoleh Sekolah Melalui Program MPMBS	51

RINGKASAN

ANALISIS MODEL MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH (MPMBS) DI TINGKAT SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA MENUJU PENGELOLAAN SEKOLAH YANG OTONOM (Tuti Budirahayu, 2002, 58 halaman)

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan: (1) bagaimana mekanisme pelaksanaan model Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) yang telah diterapkan di tingkat SLTP di beberapa sekolah di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik; (2) bentuk kerja sama apa saja yang telah dilakukan oleh sekolah dengan masyarakat setempat, melalui komite sekolah, sebagai upaya mewujudkan pengelolaan sekolah yang mandiri dan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan; (3) bagaimana mekanisme pendanaan yang telah ditetapkan oleh sekolah dan Komite Sekolah untuk menyelenggarakan segala aktivitas dan program belajar-mengajar di Sekolah; (4) apakah warga sekolah mendapat manfaat positif dengan diterapkannya program MPMBS.

Tujuan penelitian ini adalah : (1) ingin mengetahui mekanisme pelaksanaan model manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di beberapa SLTP yang telah terpilih untuk menjalankan program rintisan tersebut; (2) mengidentifikasi berbagai bentuk kerja sama yang telah, sedang dan mungkin akan dilakukan oleh sekolah dengan masyarakat setempat; (3) ingin mengetahui mekanisme pendanaan yang telah ditetapkan oleh sekolah dan komite sekolah dalam menyelenggarakan segala aktivitas dan program belajar-mengajar di sekolah; (4) ingin mengetahui hal-hal positif apa saja yang telah didapat warga sekolah dengan diterapkannya program MPMBS.

Penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan model MPMBS di tingkat SLTP dengan demikian maka tipe penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berupaya menggali dan menggambarkan berbagai hal atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan model pendidikan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Lokasi

penelitian adalah di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Penetapan ketiga wilayah tersebut bersifat purposive dengan pertimbangan bahwa di tiga wilayah itu memiliki kekhasan atau karakteristik masyarakat yang berbeda (Surabaya sebagai Kota Besar atau metropolis, Sidoarjo sebagai kota industri yang sedang berkembang dan Gresik juga sebagai kota industri yang sedang berkembang namun nuansa pedesaannya masih terasa) sehingga variasi perbedaan tersebut dapat memperkaya khasanah temuan penelitian. Dari ketiga wilayah tersebut, diambil 9 sekolah sebagai subyek penelitian, yaitu: SLTP Negeri 30, 22, 17 dan 2 di Kota Surabaya, SLTP Negeri 1 Driyorejo dan SLTP Negeri 1 Manyar di Kabupaten Gresik, dan SLTP Negeri 1 Sidoarjo, SLTP Negeri 2 Wonocayu serta SLTP Negeri 1 Krian, di Kabupaten Sidoarjo. Kesembilan sekolah itu diambil sebagai subyek penelitian karena berdasarkan data yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Timur, kesembilan sekolah tersebut telah ditunjuk untuk melaksanakan program rintisan MPMBs. Data diambil dengan menggunakan seperangkat daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat terbuka. Sumber data adalah pimpinan sekolah dan beberapa orang guru yang dianggap berkompeten dalam menjelaskan kronologis dan mekanisme pelaksanaan MPMBs di sekolah masing-masing. Data dianalisis dengan mendeskripsikan selengkap mungkin berbagai informasi yang menjadi *focus point* penelitian ini. Dari hasil analisis dibuat kategorisasi dengan tujuan agar dapat diperoleh berbagai variasi karakteristik penerapan MPMBs di masing-masing sekolah yang menjadi subyek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) mekanisme pelaksanaan MPMBs di sembilan sekolah yang menjadi subyek penelitian dapat dikategorikan menjadi dua versi. Pertama, dengan mengajukan proposal tentang upaya peningkatan mutu sekolah ke Kantor Wilayah Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Timur, dan kedua, kepala sekolah atau wakilnya tidak mengajukan proposal tetapi merasa telah mengikuti penataran tentang pelaksanaan program MPMBs, sehingga secara otomatis mereka menganggap sekolahnya diikuti oleh Diknas dalam program rintisan MPMBs; (2) bentuk kerja sama yang dilakukan komite sekolah dengan masing-masing sekolah cukup bervariasi, namun sebagian besar sekolah

lebih banyak yang berinisiatif lebih dulu untuk meminta bantuan dana dari pihak komite sekolah, terutama guna membangun sarana fisik sekolah (laboratorium, aula, musholla, dll), jadi dalam hal ini peran komite sekolah tak ubahnya seperti BP3. Meskipun ada beberapa sekolah yang memiliki komite sekolah yang cukup baik, tetapi peran komite sekolah masih banyak yang pasif dan nampak belum memiliki visi dan misi yang jelas tentang upaya pengembangan sekolah di masa yang akan datang; (3) Mekanisme pendanaan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di hampir semua sekolah yang menjadi subyek penelitian masih bergantung pada subsidi pemerintah dan dana dari iuran orang tua siswa (BP3). Peran komite sekolah untuk ikut membantu mengatur mekanisme pendanaan masih belum nampak, meskipun memang ada beberapa sekolah yang telah bekerja sama dengan komite sekolahnya untuk mengatur pendanaan sekolah dan bahkan membuat unit-unit usaha yang dapat memberi pemasukan bagi sekolah (*income generating*); (4) Manfaat positif yang diperoleh sekolah dari pelaksanaan MPMBS cukup beragam, salah satunya muncul banyak inisiatif dan ide-ide kreatif dari para guru dan murid dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar di sekolah.

Oleh karena program MPMBS ini baru dilakukan dalam kurun waktu dua tahun, maka memang banyak hal yang harus dibenahi dan dievaluasi pelaksanaannya agar untuk masa yang akan datang program ini dapat lebih efektif dan berdaya guna.

(L.P. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, No. 774/JO3/PG/2002, 11 Juni 2002)

BAB I PENDAHULUAN



I.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini, khususnya pada ranah pendidikan formal, seringkali mendapat kritikan yang tak sedap. Beberapa kritik itu misalnya, soal mutu lulusan yang semakin lama semakin tidak berkualitas akibat terlalu mudahnya guru meluluskan siswanya. Kritik lainnya ditujukan kepada para guru yang tidak memiliki kewenangan dalam menentukan arah pendidikan karena ketidakberdayaan mereka menghadapi birokrasi persekolahan, atau karena adanya kebijakan penerapan kurikulum yang sentralistik. Masih seputar masalah guru, di mana mereka seringkali dituduh terlalu pasif, takut (atau malas ?) mengambil inisiatif dan kurang kreatif (Darmaningtyas, 1999). Belum lagi persoalan tentang kebiasaan menjadikan sekolah sebagai ladang bisnis yang dilakukan oleh perusahaan swasta (penerbit buku pelajaran, alat-alat tulis, kain seragam,dll) yang bekerja sama dengan kepala sekolah di mana mereka dengan sewenang-wenang memeras orangtua murid, dalihnya demi kepentingan anak didik. Kritik lain lagi misalnya pada maraknya perkelahian antar pelajar akibat ketidakpedulian orang tua (dan masyarakat secara umum) serta guru dalam menanamkan nilai-nilai bertenggang rasa, atau malah mungkin nilai semacam itu telah hilang dalam kehidupan bermasyarakat (Drost, 1998).

Masih cukup banyak persoalan di seputar dunia pendidikan formal, di samping sekelumit persoalan yang telah diuraikan di atas. Masalah demi masalah yang sebagian telah disebutkan di atas tentu saja akan menghambat berkembangnya dunia pendidikan formal di Indonesia menuju pada kedewasaannya.

Lingkaran problem pendidikan formal yang terjadi tersebut apabila ditelisik mungkin berawal dari paradigma pendidikan yang dianut oleh pemerintah Indonesia selama ini. Di Indonesia, sekolah adalah lembaga yang dibentuk oleh negara demi kepentingan negara dan diatur secara terpusat

(sentralistik). Dalam paham tersebut peran serta masyarakat untuk ikut menentukan arah pendidikan menjadi terabaikan. Akibatnya sah-sah saja apabila kemudian aktor-aktor yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah hingga murid, dikontrol oleh pihak birokrasi, murid dikontrol oleh guru, guru dikontrol kepala sekolah. Belum lagi kontrol departemen pendidikan lewat aparatnya di daerah atas sekolah. Kontrol-mengontrol tersebut saling mengait dalam suatu jaringan yang rumit, ketat dan sulit ditembus (Sindhunata, 2000). Dengan situasi tersebut memang sungguh sukar untuk melaksanakan reformasi dan pembaruan pendidikan di sekolah, apalagi mengharapkan sekolah dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam mengekspresikan kebebasan dan spontanisitasnya untuk mengelola sekolah yang benar-benar otonom dan berdiri atas dasar idealisme membentuk anak didik yang berkualitas.

Berangkat dari berbagai masalah yang menyelimuti pendidikan formal di Indonesia, maka belum lama ini pemerintah, melalui Departemen Pendidikan Nasional, berusaha mengembalikan peran dan fungsi masyarakat di setiap daerah di Indonesia untuk ikut memikirkan persoalan pendidikan. Di bawah semangat otonomi daerah, maka otonomi di bidang pendidikan pun mulai dirintis. Pada uraian tentang kewenangan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah tingkat (Dati) II (dalam Kompas 17-20 Oktober, 2000), nampak bahwa jiwa dari seluruh kewenangan tersebut ada pada daerah. Artinya, daerah memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan segala aspek, baik dalam bidang pendidikan maupun kebudayaan, namun tetap harus memperhatikan pedoman umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Apabila memang demikian halnya, para aktor di sekolah (kepala sekolah, para guru, petugas administrasi, serta murid) mulai di tingkat SD hingga Sekolah Menengah (SMU & SMK) beserta komponen masyarakat, memiliki peluang yang cukup besar untuk ikut memberi arah dan nuansa pada jalannya proses belajar-mengajar di sekolah. Misalnya saja dalam hal kurikulum muatan lokal, para aktor di sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, siswa, hingga orang tua selaku salah satu wakil masyarakat di lingkungan sekolah berhak penuh untuk mengembangkannya.

Atas dasar itu lah maka di wilayah-wilayah Dati II, dicanangkan suatu lembaga yang disebut Dewan Pendidikan, yang tugasnya adalah menjadi mitra pemerintah setempat dalam mengurus soal pendidikan, baik untuk tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Sedangkan di lingkungan sekolah sendiri, tugas Dewan Pendidikan dipegang oleh Komite Sekolah, di mana kedua lembaga tersebut sebetulnya adalah perwujudan dari peran serta para *stake holder* atau pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan dan sekolah. Berdasarkan rencana itu pula Dati II menetapkan bahwa sekolah menjadi urusan masyarakat sehingga perlu diterapkan sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau dalam konsep yang telah dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah) berupa program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Dengan pemikiran tersebut, maka dewan pendidikan dan komite sekolah diharapkan mempunyai kewenangan yang bersifat utuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai evaluasi. Anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat dan pendidikan setempat, lembaga, swadaya masyarakat, guru, orang tua siswa dan anggota masyarakat lainnya, termasuk di dalamnya adalah pemerintah Daerah bersangkutan. Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dengan adanya wewenang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yaitu: (1) mendorong pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan; (2) menumbuhkan prakarsa dan kreativitas pada para aktor di sekolah (kepala sekolah, guru, dan murid); (3) Meningkatkan peran serta masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD (Kompas, 17 Oktober 2000).

MBS yang rintisannya diujicobakan di tingkat Sekolah Dasar (SD) pada awalnya adalah sebuah program kerja sama Pemerintah RI dengan UNESCO dan UNICEF. Pada tahun 2000 yang lalu, program rintisan MBS tingkat SD dilaksanakan di tiga propinsi, yakni: Jawa Tengah dilaksanakan pada 45 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI); di Jawa Timur melibatkan 18 SD/MI, dan Sulawesi Selatan 16 SD/MI (Tukiman, dalam Sindunata, 2000).

Kemudian pada pertengahan tahun 2001 program MBS yang kemudian lebih difokuskan dengan nama MPMBS (Manajemen Peningkatan

Mutu Berbasis Sekolah) diujicobakan pula di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di seluruh Indonesia. Pada tahap awal tersebut, untuk Jawa Timur saja, MPMBS diujicobakan di 150 SLTP (Diknas Propinsi Jawa Timur, 2002).

Dengan diterapkannya MBS atau MPMBS tersebut maka diharapkan sekolah yang didukung oleh masyarakat, yang diwakili oleh Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah, mampu lebih otonom dan dapat meningkatkan kualitas anak didiknya. Harapan yang cukup ideal tersebut akan terealisasi apabila memang ada koordinasi dan kerja sama yang baik antara berbagai pihak.

Beberapa persoalan mungkin akan muncul sehubungan dengan pelaksanaan program rintisan MBS dan MPMBS tersebut, seperti misalnya kesiapan pihak sekolah dan Komite Sekolah untuk bersama-sama merumuskan arah kebijakan pendidikan. Belum lagi persoalan tentang mekanisme pendanaan yang baik, mengingat dengan diberlakukannya otonomi atau pelimpahan kewenangan sekolah untuk mencari sumber pendanaan bagi proses belajar-mengajarnya, sekolah tidak lagi menunggu kucuran dana dari pusat dalam menjalankan aktivitasnya, dan hal-hal lain yang mungkin perlu dipikirkan atau dibenahi untuk menyempurnakan program MPMBS tersebut.

Berangkat dari cita-cita untuk mewujudkan sekolah yang otonom melalui program MPMBS, maka penelitian yang akan dilakukan ini ingin menggali berbagai informasi mengenai persoalan yang dihadapi beberapa sekolah yang telah menyelenggarakan program rintisan MPBS di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Berdasarkan informasi dari hasil penelitian ini, diharapkan nantinya akan dapat menjadi masukan bagi Departemen Pendidikan Nasional dan sekolah-sekolah setempat guna menyempurnakan kembali program MPMBS yang telah dijalaninya. Temuan penelitian ini juga nantinya dapat digunakan sebagai acuan bagi sekolah-sekolah lainnya yang akan melaksanakan model pendidikan tersebut.

I.2. RUMUSAN MASALAH:

Meskipun pelaksanaan MPMBS di tingkat SLTP baru berjalan satu tahun, namun tak ada salahnya apabila dilakukan upaya untuk menganalisis efektivitas model pendidikan tersebut bagi kemajuan dunia pendidikan formal di Indonesia. Dengan berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan di sekitar pelaksanaan program MPMBS di tingkat SLTP adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakan mekanisme Pelaksanaan Model Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yang telah diterapkan di tingkat SLTP di beberapa sekolah di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik ?
 2. Bentuk kerjasama apa saja yang telah dilakukan oleh sekolah dengan masyarakat setempat, melalui Komite Sekolah, sebagai upaya mewujudkan pengelolaan sekolah yang mandiri dan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan?
 3. Bagaimanakan mekanisme pendanaan yang telah ditetapkan oleh sekolah dan Komite Sekolah untuk menyelenggarakan segala aktivitas dan program belajar-mengajar di Sekolah ?
 4. Apakah warga sekolah mendapat manfaat positif dengan diterapkannya program MPMBS ?
-

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Upaya untuk mendidik para anggota masyarakat tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada institusi persekolahan. Masyarakat yang menitipkan anak-anaknya pada lembaga yang bernama sekolah itu, seharusnya ikut terlibat dalam proses pendidikan, bukan dalam arti mencampuri urusan guru ketika menjalankan profesinya, tetapi paling tidak memberi masukan pada sekolah dalam mengelola pendidikan. Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan sangat diperlukan terutama untuk mewujudkan konsep pendidikan untuk semua, yaitu sebuah konsep yang menegaskan keterlibatan semua pihak dalam kependidikan (Tukiman dalam Sindunatha, 2000).

UNICEF dalam rencana lima tahunannya (2001-2005) merumuskan kegiatannya dalam empat kata, yaitu: *Family and Community Empowerment*, yang dijabarkan ke dalam empat program dan kepedulian besar terhadap: (a) ibu dan balita; (b) pendidikan dasar untuk semua; (c) anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan (d) pengembangan kebijakan dan advokasi. Tentang program pendidikan dasar untuk semua dijelaskan bahwa terutama hak-hak belajar bagi anak-anak usia sekolah harus diperjuangkan oleh berbagai pihak. Tujuan utama program tersebut ialah memberikan sumbangan terhadap perbaikan kualitas pengajaran antara lain melalui upaya-upaya penguatan sekolah sehingga berkembang sebagai sekolah yang otonom penuh dan mengundang partisipasi dari orang tua dan masyarakat. Inilah salah satu landasan dari diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Apabila menggunakan pemikiran dari model MBS itu, maka mau tidak mau paradigma organisasi pengelolaan pendidikan yang selama ini ada, harus pula mengalami perubahan. Perubahan itu meliputi: (1) perubahan dari orientasi persekolahan ke orientasi belajar; (2) perubahan dari penanaman keterampilan ke pengembangan kompetensi; (3) perubahan dari kurikulum.

yang "rigid" ke kurikulum yang luwes dan fleksibel. Begitu pula pada pendayagunaan ketenagakerjaan pendidikan, harus bisa mengubah peran kepala sekolah dan guru yang selama ini hanya sebagai pelaksana menjadi seorang "enterpreneur", sehingga dengan demikian di era desentralisasi pendidikan ini, seorang kepala sekolah dan/atau guru dituntut kreatif dan tidak selalu menunggu perintah saja (Prihadiyoko, 2000).

Perubahan peran guru karena tuntutan reformasi organisasi pengelolaan sekolah, sebetulnya bukan menjadi hal baru bagi mereka. Karena apabila seorang guru memahami nilai-nilai profesionalismenya, maka apa yang menjadi tujuan dari manajemen berbasis sekolah tidak lain juga adalah upaya menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas guru. Praktek profesional itu memiliki sifat otonom, yang artinya lepas dari campur tangan pihak luar yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya (asriwandari, 1998). Bagi para guru, baik di tingkat SD hingga Sekolah Menengah, profesionalitas mereka diperlukan untuk mengasah dan membentuk pola pikir, sikap dan kepribadian anak, sehingga kelak ia siap menjadi manusia yang dapat mengisi tatanan dan peran-peran sosialnya di samping membawa perubahan kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas. Dengan profesionalitasnya pula diharapkan guru berperan menegakkan praktek-praktek pendidikan yang demokratis. Berdasarkan pemikiran ini pula alangkah indahnya apabila sejak duduk di bangku SD, para murid diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan diri, tidak seperti model pendidikan yang saat ini masih berlangsung, yaitu cenderung membelenggu murid dengan hapalan-hapalan dan tuntutan untuk menguasai materi ujian. Dengan model pendidikan yang demokratis ini juga maka tampilnya anak dalam setiap proses pembelajaran harus lebih diperbanyak (Djohan dalam Usman, 2000).

Selain peran guru menjadi lebih optimal, dengan adanya model MBS ini juga diharapkan potensi yang ada pada masyarakat di mana sekolah itu berada bisa lebih didayagunakan. MBS memiliki konsep pemikiran bersama, yaitu oleh sekolah dan masyarakat setempat. Apa yang diharapkan dari MBS seharusnya meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) interaksi antara sekolah dengan masyarakat sekitar menjadi semakin dekat; (2) mempersubur

tumbuhnya inovasi dan upaya-upaya peningkatan relevansi pendidikan bagi masyarakat sekitar; (3) Ditingkatkannya kepedulian para pelaku pendidikan, khususnya dalam hal ini adalah bertanggung jawab langsung terhadap kualitas pendidikan di sekolah dan anak-anak yang diasuhnya; (4) Ditingkatkannya partisipasi orang tua, BP3, dan masyarakat sekitar terhadap sekolah; serta (5) ditumbuhkannya kebutuhan pendidikan terhadap sumber daya lokal di sekolah-sekolah. Ada beberapa target yang diharapkan berhasil dan dapat tercapai oleh sekolah-sekolah yang melaksanakan MBS, yaitu: (a) merumuskan program sekolah yang jelas dan dapat dijelaskan kepada orang tua siswa serta masyarakat sekitar; (b) pengelolaan sekolah dalam hal keuangan dan upaya pengembangannya diumumkan secara terbuka yang salah satu caranya adalah ditempelkan di sekolah; (c) rapat rutin sekolah, BP3 dengan tokoh masyarakat sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun; (d) peningkatan disiplin waktu pada semua aktor di lingkungan sekolah, dimulai dari kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, petugas administratif, hingga murid-murid; (e) ada kontrol secara periodik oleh BP3, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar terhadap kinerja sekolah setiap harinya; (f) diadakannya pelatihan-pelatihan MBS untuk kepala sekolah, guru dan pegawai administratif lainnya secara langsung dan terukur untuk meningkatkan profesionalisme mereka; (g) diberlakukannya sistem imbalan dan sanksi yang sesuai terhadap kinerja kepala sekolah, guru dan pegawai administrasi serta penjaga sekolah; dan (h) mutu sekolah meningkat, dan peningkatannya terukur, entah lewat semakin baiknya nilai siswa, berkurangnya angka putus sekolah dan tinggal kelas atau prestasi-prestasi akademik lainnya (Tukiman, 2000).

MPMBS sesungguhnya merupakan penerapan pola manajemen yang bernuansa demokratis dan jauh berbeda dengan pola manajemen pendidikan yang dianut Indonesia selama ini yang bersifat sentralistik serta cenderung otoriter. Adapun dimensi-dimensi perubahan pola manajemen pendidikan dari yang semula bersifat sentralistik mengarah menuju pola baru manajemen pendidikan yang lebih bernuansa demokratis, adalah sebagai mana berikut ini.

Tabel 1
Dimensi-Dimensi Perubahan Pola Manajemen Pendidikan

Pola Lama	menuju	Pola baru
Subordinasi	→	Otonomi
Pengambila keputusan	→	Pengambilan keputusan
Terpusat	→	Partisipatif
Ruang gerak kaku	→	Ruang gerak luwes
Pendekatan birokratik	→	Pendekatan profesional
Sentralistik	→	Desentralistik
Diatur	→	Motivasi diri
Overregulasi	→	Deregulasi
Mengontrol	→	Mempengaruhi
Mengarahkan	→	Memfasilitasi
Menghindari resiko	→	Mengelola resiko
Gunakan uang semuanya	→	Gunakan uang seefisien mungkin
Individu yang cerdas	→	<i>Teamwork</i> yang cerdas
Informasi terribadi	→	Informasi terbagi
Pendelegasian	→	Pemberdayaan
Organisasi hirarkis	→	Organisasi datar

Sumber: Konsep Dasar MPMBS, Depdiknas, 2002

Pada pola lama, tugas dan fungsi sekolah lebih pada melaksanakan program dari pada mengambil inisiatif merumuskan dan melaksanakan program peningkatan mutu yang dibuat sendiri oleh sekolah. Sedang pada pola baru, sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan lembaganya. Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan partisipasi masyarakat semakin besar. Di samping itu sekolah lebih luwes dalam mengelola lembaganya dan pendekatan profesionalisme lebih diutamakan dari pada pendekatan birokrasi. Dengan pola baru pula maka sekolah diharapkan lebih desentralistik di mana perubahan sekolah lebih

didorong oleh motivasi diri sekolah dari pada diatur dari luar sekolah, regulasi pendidikan lebih sederhana. Dengan sistem yang desentralistik maka peran pusat bergeser dari mengontrol menjadi mempengaruhi dan dari mengarahkan ke memfasilitasi, dari menghindari resiko menjadi mengolah resiko, di samping itu penggunaan uang menjadi lebih efisien karena sisa anggaran dapat digunakan untuk tahun depan. Pola baru ini juga lebih mengutamakan *teamwork*, informasi terbagi ke semua warga sekolah, lebih mengutamakan pemberdayaan dan struktur organisasi lebih datar sehingga lebih efisien.

Apabila Model Pendidikan MBS ini diterapkan dengan sungguh-sungguh di setiap sekolah, maka iklim belajar di sekolah semacam itu selain akan memberi pengayaan pada jiwa dan pikiran murid, juga akan tercipta sinergi yang baik antara sekolah dan masyarakat.

Latar belakang diterapkannya program MBS yang kemudian lebih dispesifikasikan lagi menjadi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) adalah karena munculnya persoalan tentang rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, seperti misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat belajar, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan bahkan telah pula dilakukan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun usaha-usaha tersebut belum mampu meningkatkan mutu pendidikan secara signifikan dan merata di berbagai wilayah di Indonesia.

Berdasarkan berbagai pengamatan dan analisis, penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia paling tidak disebabkan oleh tiga faktor (Depdiknas, Dirjen Dikdasmen, 2002). Ketiga faktor itu adalah:

1. Pendekatan *education production function* atau *input - process- output analysis* tidak dilaksanakan secara konsekuen. Hal ini karena tiga komponen dalam analisis input - process - output tidak diterapkan secara bersama-sama. Yang lebih ditekankan selama ini adalah pada bagian input (guru yang telah mendapat berbagai pelatihan, buku-buku

dan alat pelajaran yang lengkap, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan), belum pada proses pendidikannya. Padahal proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan. Proses pendidikan dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dsb.) dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar dan benar-benar mampu memberdayakan dan mengembangkan diri anak didik.

2. Penyelenggaraan pendidikan nasional selama ini dilakukan secara birokratik-sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan menjadi sangat tergantung pada keputusan birokrasi. Birokrasi pun memiliki jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Sekolah pada akhirnya lebih merupakan subordinasi dari birokrasi di atasnya sehingga mereka kehilangan kemandirian, keluwesan, motivasi, kreativitas dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya, termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.
3. Minimnya peran masyarakat dan warga sekolah, dalam hal ini selain guru adalah orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan. Seringkali partisipasi, suara dan prakarsa guru diabaikan oleh birokrasi sekolah, padahal perubahan yang terjadi di sekolah lebih besar ditentukan oleh peran guru dibandingkan dengan lembaga-lembaga di luar sekolah. Begitu pula partisipasi masyarakat selama ini, pada umumnya sebatas pada dukungan dana (terutama di sekolah-sekolah yang memiliki siswa dengan latar belakang orang tua yang mampu), belum pada dukungan pemikiran, moral, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sekolah dan siswa. Dengan kondisi seperti itu maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat lemah. Sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada

kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan (*stakeholder*).

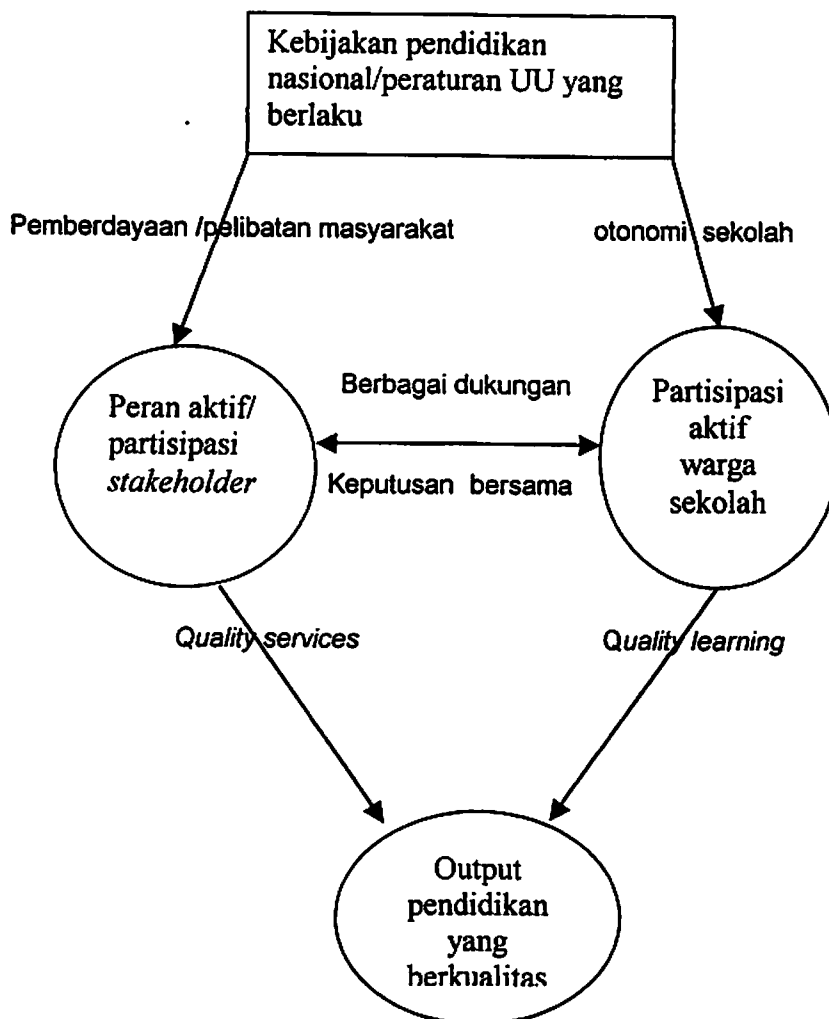
Latar belakang situasi pendidikan formal di Indonesia yang seperti itulah yang kemudian melahirkan pemikiran tentang perlunya perubahan orientasi, dari yang semula bertipe manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

Secara umum Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dapat dipahami sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keluwesan kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dsb.) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila digambarkan dalam bentuk skema maka bentuknya adalah sebagaimana berikut ini:



MODEL PENDIDIKAN DENGAN POLA MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH



Dengan otonomi yang lebih besar, maka sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar pula dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya itu pula sekolah akan lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya.

Dengan keluwesannya itu pula diharapkan sekolah akan lebih lincah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya sekolah secara optimal, demikian juga dengan partisipasi warga sekolah dan masyarakat secara

langsung dalam penyelenggaraan sekolah, maka rasa memiliki mereka terhadap sekolah dapat ditingkatkan. Peningkatan rasa memiliki tersebut akan menyebabkan peningkatan rasa bertanggung jawab dan peningkatan rasa tanggung jawab tersebut akan meningkatkan dedikasi warga sekolah dan masyarakat dalam pendidikan. Peningkatan otonomi sekolah, keluwesan pengelolaan sumber daya sekolah maupun partisipasi warga sekolah serta masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah, semuanya ditujukan untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dicanangkannya MPMBS meliputi beberapa aspek, yaitu :

1. meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas/keluwesan, partisipasi, keterbukaan, kerja sama, akuntabilitas, sustainabilitas dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia;
2. meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui keputusan bersama;
3. meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah;
4. meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah, terutama dalam hal peningkatan mutu pendidikan yang akan dicapai

Adapun alasan diterapkannya MPMBS bagi sekolah-sekolah di tingkat dasar dan menengah berdasarkan Buku Tentang Konsep Dasar MPMBS (2002), antara lain adalah:

- Dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah, maka sekolah akan lebih memacu inisiatif/kreatifitasnya dalam meningkatkan mutu sekolah.
- Dengan pemberian keluwesan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber dayanya, maka sekolah akan lebih lincah dalam mengadakan dan memanfaatkan

sumber daya sekolah secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah.

- Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (*SWOT analysis*) bagi dirinya sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya;
- Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
- Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah lah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.
- Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bila mana dikontrol oleh masyarakat setempat.
- Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.
- Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.
- Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.

- Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat.

Apa yang menjadi cita-cita ideal masyarakat Indonesia yaitu menuju pada tatanan masyarakat yang demokratis, berkeadilan dan lebih baik pada masa yang lalu sebetulnya telah terwadahi dalam model pendidikan MPMBS yang sedang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa pendidikan dapat memenuhi fungsinya sebagai daya pengubah (*agent of change*) masyarakat di mana dengan nilai-nilai barunya itu sekolah mendidik masyarakat untuk dapat memahami tata kehidupan yang lebih demokratis. Dengan diterapkannya model pendidikan yang seperti itu maka setidaknya sekolah mampu mengikuti laju perkembangan sehingga bangsa Indonesia tidak ketinggalan dari bangsa lainnya.

.....

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

III.1. Tujuan Penelitian

Ada beberapa hal yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan ini, antar lain adalah:

1. Ingin mengetahui mekanisme pelaksanaan model Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di beberapa SLPT yang terpilih menjalankan program rintisan ini.
2. Mengidentifikasi berbagai bentuk kerjasama yang telah, sedang dan mungkin akan dilakukan oleh sekolah dengan masyarakat setempat.
3. Ingin mengetahui mekanisme pendanaan yang telah ditetapkan oleh sekolah dan Komite Sekolah dalam menyelenggarakan segala aktivitas dan program belajar-mengajar di Sekolah
4. Ingin mengetahui hal-hal positif apa saja yang telah didapat warga sekolah dengan diterapkannya program MPMBS.

III.2. Manfaat Penelitian

Oleh karena MPMBS adalah salah satu program dari Departemen Pendidikan Nasional untuk mengembangkan sistem persekolahan yang mandiri serta untuk merealisasikan adanya keinginan melakukan otonomi di segala bidang, termasuk pendidikan, maka melalui penelitian ini ada beberapa manfaat yang bisa dipetik:

1. Secara praktis, sebagai masukan bagi Depdiknas dan Pemerintah Daerah setempat, untuk lebih menyempurnakan model pendidikan MPMBS.
2. Secara akademis, penelitian tentang MPMBS akan memperkaya khasanah disiplin Sosiologi Pendidikan, khususnya sebagai bagian

dari kajian tentang pola dan proses interaksi-interelasi antara sekolah dan masyarakat serta peran pendidikan sebagai daya pengubah (*agent of change*) menuju masyarakat Indonesia yang lebih demokratis.

.....

BAB IV

METODE PENELITIAN

Studi yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan model MPMBS di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), yang dikaitkan pula dengan upaya menjadikan sekolah yang bersangkutan lebih otonom dalam pengelolaannya. Dengan memperhatikan tujuan yang demikian itu, maka tipe atau jenis penelitian untuk itu adalah deskriptif. Dengan sifatnya yang deskriptif tersebut, maka diharapkan berbagai informasi yang ingin digali dapat tergambar dengan jelas melalui penelitian ini.

Oleh karena program MPMBS baru dilaksanakan pada tahun 2001 dan untuk wilayah Jawa Timur hanya dilakukan di 150 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), maka dari berbagai wilayah yang ada di Jawa Timur ditetapkan tiga wilayah yang akan dijadikan lokasi penelitian, yaitu: **Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik**. Penetapan ketiga wilayah tersebut bersifat *purposive*, dengan pertimbangan bahwa antara Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Gresik memiliki kekhasan atau karakteristik masyarakat yang berbeda sehingga variasi perbedaan tersebut dapat memperkaya khasanah dari temuan penelitian. Alasan lain ditetapkannya tiga wilayah tersebut sebagai lokasi penelitian, adalah karena faktor efisiensi biaya, tenaga dan waktu, sehingga apabila penelitian ini dilakukan di hampir seluruh wilayah Jawa Timur maka akan menyulitkan peneliti.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Timur, diperoleh informasi bahwa ada empat sekolah di Kota Surabaya yang mendapat kesempatan awal melaksanakan program MPMBS, yaitu SLTP Negeri 30, 22, 17 dan 2, di Kabupaten Gresik ada dua SLTP, yaitu SLTPN 1 Driyorejo dan SLTPN 1 Manyar dan di Kabupaten Sidoarjo ada tiga, yaitu SLTP Negeri 1 Sidoarjo, SLTP Negeri 2 Wonoayu dan SLTP Negeri 1 Krian. Penetapan sekolah-sekolah dalam pelaksanaan

program MPMBS sepenuhnya merupakan wewenang Depdiknas. Oleh karena itu kesembilan sekolah tersebut terambil sebagai sampel penelitian ini.

Data diambil dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat terbuka. Tujuan penggunaan model instrumen tersebut adalah agar cukup banyak informasi yang dapat diperoleh peneliti sehingga dapat menggambarkan fenomena yang ingin diketahui dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan pimpinan sekolah dan beberapa orang guru karena merekalah yang dianggap berkompeten dalam menjelaskan kronologis dan mekanisme pelaksanaan MPMBS.

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan mendeskripsikan selengkap mungkin berbagai informasi yang menjadi *focus point* penelitian ini. Dari hasil analisis tersebut akan diupayakan untuk membuat kategorisasi dengan tujuan agar dapat diperoleh berbagai variasi karakteristik penerapan MPMBS di masing-masing sekolah.

.....

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1. Hasil Penelitian

V.1. 1. Karakteristik Subyek Penelitian

Seperti telah disebutkan pada Bab IV, bahwa tidak semua SLTP di Jawa Timur telah menerapkan model pendidikan MPMBS. Pencanangan program MPMBS itu sendiri baru di mulai pada tahun 2001, di mana peran pemerintah (melalui Departemen Pendidikan Nasional) adalah sebagai salah satu *stake holder* sekaligus penggagas awal program MPMBS di tingkat SLTP. Program percontohan dilakukan Depdiknas dengan memilih sejumlah SLTP dan SLTP-SLTP yang ditunjuk tersebut diberi dana dengan nama Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM). Pada tahap awal dana BOMM yang diberikan pemerintah sebesar Rp. 20.000.000,-. Dengan dana tersebut, diharapkan sekolah dapat mengembangkan potensinya, meningkatkan kualitas pendidikannya dan dalam jangka panjang sekolah diharapkan dapat menggali dana sendiri terutama untuk pengembangar kegiatan belajar mengajar.

Setelah diperoleh data tentang SLTP yang menerima BOMM, maka langkah selanjutnya adalah memilih beberapa SLTP yang berada dalam jangkauan peneliti. Di Kota Surabaya, berdasarkan data awal yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Nasional Jawa Timur diketahui ada empat sekolah yang ditunjuk untuk mengikuti program MPMBS, yaitu SLTP Negeri 30, 22, 17 dan 2. SLTP Negeri 30 letaknya di wilayah Surabaya Timur (daerah Medokan) dan lokasinya agak jauh dari keramaian Kota Surabaya . Apabila dibandingkan dengan SLTP lainnya yang menjadi subyek penelitian ini, SLTP Negeri 30 tergolong sekolah dengan nuansa pedesaan karena lokasinya memang berdekatan dengan areal persawahan dan bersebelahan dengan pemukiman warga pinggiran Kota Surabaya. Sedangkan SLTP Negeri 22 (di wilayah Rungkut) dan SLTP Negeri 17 (di wilayah Pagesangan) berada di

sekitar kompleks perumahan kelas menengah warga Surabaya. Agak berbeda dengan SLTP yang lain, SLTP Negeri 2 Surabaya, berada di Jalan Kepanjen, letaknya sangat dekat dengan pusat Kota Surabaya dan lingkungan di sekitar sekolah terdiri dari kantor-kantor, sekolah swasta yang cukup bonafid di Kota Surabaya serta dekat pula dengan pusat perdagangan (Pasar Turi dan Jembatan Merah Plaza).

Di Kabupaten Gresik ada dua SLTP yang tercatat telah menerima dana BOMM, yaitu SLTP Negeri 1 Manyar dan SLTP Negeri 1 Driyorejo. Kedua sekolah tersebut tidak berada di tengah Kota Gresik tetapi saling berjauhan. SLTP Negeri 1 Driyorejo dapat dikatakan mendekati ujung perbatasan Kabupaten Gresik dengan Kota Surabaya, dan lingkungan di sekitar sekolah tersebut masih belum tertata dengan baik di mana masyarakatnya pun berada pada tahap transisi, yaitu dari suasana atau lingkungan pedesaan menuju ke kehidupan masyarakat industri. Sedangkan SLTP Negeri 1 Manyar letaknya cukup jauh dari pusat kota, tepatnya berada di dekat wilayah pantai utara pulau Jawa. SLTP Negeri 1 Manyar boleh dikatakan sebagai sekolah yang masih dikelilingi oleh kehidupan kultur masyarakat pedesaan

Sedangkan di Kabupaten Sidoarjo, ada tiga sekolah yang telah menerima dana BOMM dan melaksanakan MPMBS, yaitu: SLTP Negeri 1 Sidoarjo, SLTP Negeri 2 Wonoayu dan SLTP Negeri Krian. Ketiga sekolah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. SLTP Negeri 1 Sidoarjo merupakan salah satu sekolah yang cukup dikenal di kalangan masyarakat Kota Sidoarjo, karena letaknya memang berada di pusat kota. SLTP Negeri 2 Wonoayu sebaliknya, ia adalah sekolah yang boleh dikatakan cukup jauh dari pusat keramaian kota dan berada di sekitar kehidupan masyarakat pedesaan. Sedangkan SLTP Negeri 1 Krian, letaknya berada di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, di mana lingkungan di sekitar sekolah tersebut, boleh dikatakan sebagai daerah transisi, yaitu berada di antara daerah pedesaan dengan areal industri.

Jadi total keseluruhan subyek dalam penelitian ini adalah sembilan SLTP di mana masing-masing sekolah memiliki karakteristik yang berbeda tergantung kehidupan dan lingkungan masyarakat di sekitarnya.



V.1.2. Kronologis Pelaksanaan MPMBS di Masing-Masing Sekolah

1. SLTP Negeri 2 Surabaya:

Kepala sekolah SLTP Negeri 2 Surabaya mengatakan bahwa terpilihnya sekolah yang ia pimpin dalam menerapkan program MPMBS adalah bukan suatu keistimewaan. Menurutnya, semua kepala sekolah di tingkat SLTP telah mendapatkan penataran tentang MPMBS di Malang. Sehingga semua sekolah dianggapnya telah melaksanakan MPMBS, terutama setelah dilakukan penataran tentang MPMBS.

2. SLTP Negeri 17 Surabaya :

Kepala sekolah SLTP Negeri 17 Surabaya mengaku bahwa sekolahnya belum benar-benar melaksanakan program MPMBS. Tetapi ia bersama seluruh kepala sekolah SLTP se Surabaya pernah mengikuti penataran dan pelatihan MPMBS di Malang. Atas dasar penataran itulah maka kepala sekolah SLTP Negeri 17 pernah mengadakan satu kali pertemuan dengan warga sekolah (guru-guru) dan unsur masyarakat (orang tua siswa dan tokoh masyarakat setempat) untuk membahas dibentuknya komite sekolah. Tetapi pertemuan itu hanya berlangsung satu kali dan sampai saat ini belum ada pertemuan lagi untuk merealisasikan pelaksanaan MPMBS.

3. SLTP Negeri 22 Surabaya:

Menurut Kepala sekolah dan wakilnya, asal mula SLTP Negeri 22 melaksanakan program MPMBS adalah karena upaya mereka yang mengajukan proposal tentang peningkatan tata tertib di lingkungan sekolah, kemudian proposal tersebut mereka kirimkan ke Kantor Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Timur. Proposal itu dibuat seiring dengan adanya tawaran dari Kantor Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Timur kepada SLTP-SLTP se Jawa Timur untuk

mendapatkan subsidi dana BOMM. BOMM akan diberikan dengan syarat pihak sekolah harus memiliki program-program konkret dalam upaya untuk meningkatkan mutu sekolah. Proposal itu dibuat oleh para staf sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, beberapa guru dan Ketua BP3) di mana mereka berdiskusi terlebih dahulu untuk menentukan program-program apa saja yang akan diusulkan dalam rangka pelaksanaan MPMBS. Setelah proposal tersebut mereka ajukan, tidak berapa lama kemudian Diknas Propinsi merekomendasi SLTP Negeri 22 Surabaya untuk melaksanakan program tersebut.

4. SLTP Negeri 30 Surabaya:

Sama seperti SLTP Negeri 22 Surabaya, sebelum melaksanakan program MPMBS, kepala sekolah SLTP Negeri 30 juga mengajukan proposal terlebih dahulu kepada Kantor Dinas Diknas Propinsi Jawa Timur. Selain itu secara geografis, letak SLTP Negeri 30, menurut kepala sekolah, berada jauh dari pusat Kota Surabaya dan areal wilayah sekolah ini cukup luas, yaitu 1,5 ha. Kondisi semacam itu yang menurut kepala sekolah, mendukung diberikannya paket dana BOMM dari Kantor dinas Diknas Propinsi Jawa Timur. Oleh karena proposal yang diajukan pihak sekolah adalah difokuskan pada upaya peningkatan kegiatan ekstra kurikuler, maka pihak sekolah dalam melaksanakan kegiatan MPMBS fokusnya juga pada peningkatan mutu kegiatan ekstra kurikuler siswa, misalnya: silat, tari, olah raga dan karya ilmiah. Seperti misalnya kegiatan teater siswa, di mana kelompok teater dari sekolah ini pernah memperoleh prestasi dengan memperoleh juara 1 di tingkat kecamatan dan kota. Prestasi lainnya juga membanggakan, hal itu dibuktikan dengan cukup banyaknya piala yang diterima sekolah ini dari berbagai kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti oleh siswa-siswanya. Menurut kepala sekolah hal tersebut karena hasil penggemblengan MPMBS yang sudah satu tahun mereka laksanakan.

5. SLTP Negeri 1 Sidoarjo:

Berdasarkan penuturan kepala sekolah SLTP Negeri 1 Sidoarjo, dipilihnya sekolah tersebut menjadi salah satu tempat uji coba MPBS adalah karena prestasi NEM dari siswa-siswa di sekolahnya cukup tinggi, juga karena cukup banyak prestasi yang diraih para siswa dari berbagai kegiatan ekstra kurikuler. Hal lain yang turut berpengaruh atas terpilihnya sekolah ini untuk melaksanakan program MPMBS menurut kepala sekolah adalah karena letak lokasi sekolah ini yang berada di tengah kota.

6. SLTP Negeri 1 Krian :

Terpilihnya sekolah ini dalam program MPMBS menurut kepala sekolah, adalah karena adanya upaya dari pihak sekolah untuk mengajukan proposal kepada Kantor Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Timur dan proposal tersebut pada akhirnya disetujui. Hal lain yang juga menjadi faktor pendukung dipilihnya sekolah ini untuk menerapkan program MPMBS adalah karena letak sekolah yang strategi, yaitu berada di antara perbatasan Kota Surabaya dan Mojokerto, selain juga karena faktor NEM yang diperoleh siswa-siswa dari sekolah tersebut yang relatif cukup tinggi serta prestasi kegiatan ekstra kurikuler, seperti kegiatan seni campur sari dan hadrah di mana siswa-siswa dari sekolah ini pernah meraih kejuaraan di tingkat Kabupaten Sidoarjo.

7. SLTP Negeri 2 Wonoayu :

Sama seperti upaya dari SLTP Negeri 1 Krian, SLTPN Negeri 2 Wonoayu ini juga terlebih dahulu mengajukan proposal untuk mengikuti uji coba MPMBS. SLTP Negeri 2 Wonoayu ini ternyata telah tiga kali mendapat dana BOMM dari Diknas, dengan jumlah bantuan total adalah tujuh puluh juta rupiah (tahap pertama dan kedua masing-masing mendapat 20 juta rupiah, dan tahap ketiga mendapat 30 juta rupiah). Menurut kepala sekolah, dipilihnya sekolah ini mengikuti program MPMBS adalah karena didasarkan penilaian dari komite independen yang dibentuk Diknas.

8. SLTP Negeri 1 Manyar:

Kepala sekolah dari SLTP ini menganggap bahwa dipilihnya sekolah tersebut menjadi salah satu tempat untuk penerapan program MPMBS adalah karena prestasi siswa-siswanya, di mana prestasi belajar siswa dari sekolah ini tergolong lima besar di Kabupaten Gresik. Bahkan tahun lalu, SLTP Negeri 1 Manyar menduduki peringkat kedua tertinggi se Kabupaten Gresik dalam perolehan NEM siswa.

9. SLTP Negeri 1 Driyorejo:

Apa yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mendapatkan kesempatan mengikuti program MPMBS adalah sama seperti beberapa sekolah lain yang telah disebutkan di atas, yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan proposal ke pihak Diknas. Hal-hal yang dijadikan panduan sekolah ini dalam menyusun proposal adalah dengan melihat kecenderungan jumlah siswa, prestasi akademis dan kegiatan ekstra kurikuler siswa serta kondisi fisik sekolah. Dengan acuan tersebut maka proposal diajukan ke Kantor Dinas Diknas Propinsi Jawa Timur dan tak lama kemudian Diknas memberikan BOMM serta mengakomodasi pelaksanaan MPMBS di sekolah tersebut.

Secara ringkas variasi latar belakang atau kronologis sekolah menjalankan program MPMBS dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2: Variasi Kronologis Sekolah Menjalankan Program MPMBS

No.	Nama Sekolah	Sebab melaksanakan MPMBS	Keterangan
1.	SLTP Negeri 2 Surabaya	merasa telah mengikuti penataran tentang program MPMBS	-
2.	SLTP Negeri 17 Surabaya	merasa telah mengikuti penataran tentang program MPMBS	Mengaku belum benar-benar melaksanakan program MPMBS
3.	SLTP Negeri 22	mengajukan proposal ke Diknas	Fokus yang diajukan dalam proposal adalah peningkatan mutu tata tertib sekolah
4.	SLTP Negeri 30	Mengajukan proposal ke Diknas	Fokus yang diajukan dalam proposal adalah peningkatan mutu kegiatan ekstra kurikuler
5.	SLTP Negeri 1 Sidoarjo	Merasa bahwa NEM siswa cukup tinggi, banyak prestasi di bidang ekstra kurikuler, sekolah letaknya di kota	-
6.	SLTP Negeri 1 Krian	Mengajukan proposal ke Diknas. Merasa letak sekolah strategis (perbatasan Surabaya-Mojokerto), NEM siswa cukup tinggi dan banyak prestasi dibidang ekstra kurikuler.	-
7.	SLTP Negeri 2 Wonoayu	Mengajukan proposal ke Diknas	Telah mendapatkan dana BOMM sebanyak 3 kali
8.	SLTP Negeri 1 Manyar	Merasa bahwa prestasi belajar siswanya tergolong 5 besar di Kabupaten Gresik	-
9.	SLTP Negeri 1 Driyorejo	Mengajukan proposal ke Diknas	Fokus yang diajukan dalam proposal adalah trend jumlah siswa, peningkatan mutu prestasi akademis dan kegiatan ekstra kurikuler siswa serta kondisi fisik sekolah

V.1.3. Pembentukan dan Peran Komite Sekolah (*Stakeholder*)

Pembentukan Komite Sekolah yang juga merupakan *Stakeholder* pendidikan (pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sekolah) menjadi salah satu syarat dilaksanakan program MPMBS. Untuk membedakan pola

atau model pendidikan lalu yang bersifat sentralistik dengan yang saat ini sedang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, yaitu desentralistik seiring dengan tujuan untuk membentuk tatanan masyarakat yang lebih demokratis, maka peranan masyarakat sebagai salah satu pendukung pendidikan tidak dapat diabaikan. Oleh sebab itu komite sekolah, di mana salah satu komponennya adalah orang tua siswa dan anggota masyarakat, mutlak diperlukan dalam pelaksanaan MPMBS.

Berikut ini proses terbentuknya komite sekolah di masing-masing subyek penelitian.

1. SLTP Negeri 2 Surabaya:

Kepala sekolah SLTP Negeri 2 Surabaya menyadari bahwa memang pada dasarnya urusan sekolah bukan hanya tanggung jawab sekolah saja tetapi juga tanggung jawab masyarakat, pemerintah dan orang tua siswa. Untuk itu sekolah tersebut juga telah membentuk komite sekolah (Dengan didukung oleh Surat Keputusan/SK) di mana komponennya adalah: para alumnus, dewan guru, tokoh masyarakat yang ada di sekitar wilayah sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat, orang tua siswa (wali murid) dan ada juga para ahli (dosen-dosen dari perguruan tinggi, ahli hukum, dokter, dll).

Peran komite sekolah, menurut kepala sekolah, yang terutama adalah sebagai penunjang untuk memberikan bantuan moril (pemikiran) dan materil, tetapi tidak termasuk bantuan edukatif (mengajar atau memberi materi pendidikan) karena hal itu menurut kepala sekolah, menjadi urusan guru dan kepala sekolah.

Mengenai intensitas pertemuan dalam komite sekolah, menurut kepala sekolah pertemuannya cukup intens, tetapi agenda pertemuan rutin adalah pada setiap tahun ajaran baru atau bila sekolah mempunyai permasalahan yang perlu dibicarakan. Baru-baru ini atas dukungan komite sekolah, SLTP Negeri 2 Surabaya mengadakan penyuluhan anti narkoba kepada para siswanya.

Meskipun telah terbentuk komite sekolah yang terdiri dari berbagai komponen seperti yang telah disebutkan di atas, namun secara riil yang aktif

sebagai komite sekolah di SLTP Negeri 2 adalah orang tua siswa, itu pun sebatas dilibatkan dalam program-program pengembangan fasilitas fisik, seperti renovasi laboratorium bahasa, menambah kelengkapan dan perbaikan fasilitas fisik di sekolah, seperti penambahan komputer. Pihak sekolah lah yang terlebih dahulu menawarkan program atau kegiatan dan kemudian dibicarakan di tingkat komite sekolah. Pihak sekolah lebih sering mengajukan permohonan bantuan dana pada pihak komite sekolah, dan kemudian komite sekolah membicarakan hal tersebut kepada wali murid untuk menetapkan berapa jumlah sumbangan yang harus dibayarkan masing-masing wali murid.

Peran komite sekolah seperti di SLTP Negeri 2 tersebut memang cenderung belum aktif, komite sekolah sifatnya hanya menyetujui apa yang diusulkan oleh sekolah dan fungsinya hampir sama seperti BP3.

1. SLTP Negeri 17 Surabaya

Pembentukan komite sekolah di SLTP Negeri 17 Surabaya ternyata belum tuntas dilakukan, karena pertemuan antara pihak sekolah (diwakili oleh kepala sekolah dan dewan guru) dengan unsur masyarakat (dalam hal ini adalah orang tua siswa serta tokoh masyarakat setempat) baru dilakukan satu kali. Belum ada pertemuan lanjutan yang membahas atau menetapkan anggota dalam komite sekolah. Nampaknya, SLTP Negeri 17 ini belum sepenuhnya melaksanakan azas atau prinsip-prinsip MPMBS dan kepala sekolahnya sendiri pun mengakui bahwa penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya sama seperti dulu, yaitu masih menggunakan pola pendidikan yang sentralistik.

2. SLTP Negeri 22 Surabaya

Stake holder atau komite sekolah yang terbentuk di SLTP Negeri 22 Surabaya untuk sementara hanya melibatkan ketua dan pengurus BP3 (perwakilan orang tua siswa), selain komponen-komponen dari warga sekolah sendiri. Sedangkan tokoh masyarakat belum dilibatkan secara keseluruhan. Komite sekolah baru terbentuk pada April 2001, dan akan membentuk komite

sekolah yang cukup lengkap anggotanya setelah diadakannya *workshop*, yaitu setelah Bulan Mei 2002.

Ada beberapa pihak yang rencananya akan direkrut sebagai anggota dari komite sekolah. Pihak-pihak yang telah dihubungi untuk membentuk komite sekolah, selain orang tua siswa, antara lain: praktisi hukum, praktisi pendidikan, dan beberapa tokoh masyarakat.

Pola hubungan yang terjalin antara sekolah dengan komite sekolah, masih belum sejajar atau setara, karena selama ini penanggung jawab kegiatan masih dipegang oleh pihak sekolah. Tugas dan tanggung jawab komite sekolah lebih ditekankan sebagai pemantau atau badan yang memonitor atau mengevaluasi proses pendidikan. Namun meskipun telah ditetapkan tugas dan tanggung jawab yang demikian itu, dalam kenyataannya yaitu selama masa uji coba, pihak sekolah lah yang masih lebih dominan atau berinisiatif mengundang anggota-anggota komite sekolah.

Kepala sekolah SLTP Negeri 22 Surabaya, juga merasakan bahwa dalam tahap uji coba melaksanakan MPMBS, warga sekolah maupun pihak komite sekolah masih belum memahami pelaksanaan MPMBS secara menyeluruh. Salah satu sebab kurangnya pemahaman mereka tentang MPMBS adalah karena program ini dijalankan baru satu tahun (tahun pertama).

4. SLPTP Negeri 30, Surabaya

Kepala Sekolah SLTP Negeri 30 Surabaya merangkul berbagai pihak untuk menjadi bagian dari komite sekolah di tempat yang ia pimpin. Beberapa nama yang menjadi salah satu anggota komite sekolah antara lain adalah mantan pimpinan PT Cipta Karya (perusahaan jasa kontraktor), beberapa dosen ITS (karena memang sekolah ini berdekatan dengan ITS), dewan guru dan para alumni dari sekola ini. Pihak lain yang diminta juga untuk menjadi pendukung komite sekolah adalah pihak rumah sakit yang menjadi tetangga sekolah, kemudian juga beberapa guru SMU, karena sekolah ini juga bertetangga dengan SMU negeri 20. Upaya lain yang ditempuh pihak sekolah dalam menerapkan program MPMBS adalah menjalin kerja sama dengan

perguruan tinggi, seperti UBAYA, di mana pihak UBAYA datang ke SLTP Negeri 30 dalam rangka penelitian air sungai di sekitar sekolah ini. Sedangkan dengan Universitas Airlangga, pernah pula ada rintisan kerja sama untuk program kesehatan gigi siswa.

Kepala sekolah di SLTP Negeri 30 ini cukup baik pemahamannya tentang pelaksanaan MPMBS. Ia menunjukkan bahwa BP 3 (sebagai perwakilan orang tua siswa) sudah tidak lagi berperan dalam model MPMBS, dan perannya diganti oleh komite sekolah, sesuai dengan keputusan menteri no. 44/U/2002.

Jalinan kerja sama yang dirintis pihak sekolah dengan komite sekolah adalah berupaya memaksimalkan potensi lahan sekolah yang relatif luas. Salah satu contoh yang akan dijadikan program penunjang kegiatan MPMBS, adalah memproduksi krupuk ikan di mana ikannya dibudidayakan sendiri di sekolah. Ide ini muncul dari komite sekolah, karena kebetulan pula ketua komite sekolahnya adalah seorang insinyur sekaligus juga sebagai pengusaha. Program *life skill* akan diterapkan dalam usaha pembuatan krupuk. Rencana yang cukup matang nampaknya telah dibuat pihak komite sekolah, antara lain adalah dengan akan dibangunnya kolam ikan, diadakannya mesin-mesin pengolah ikan untuk dijadikan bahan baku tepung krupuk, dan sebagainya. Harapan kepala sekolah adalah agar kelak siswa-siswa SLTP Negeri 30 ini merasa bangga karena dengan cara seperti itu mereka dapat hidup lebih mandiri.

Wawasan kepala sekolah SMU Negeri 30 Surabaya tentang penerapan atau mekanisme pelaksanaan MPMBS ini sangat baik. Ia tidak menekankan bahwa siswa harus memiliki nilai NEM yang tinggi, tetapi yang lebih ditekankannya adalah bahwa siswa harus memiliki wawasan berpikir dan berkarya yang cukup luas. Oleh karena itu, kepala sekolah lebih menekankan kepada siswa-siswanya untuk meningkatkan mutu, selain di bidang kurikuler, juga kegiatan ekstra kurikuler, karena dengan menekuni bidang-bidang yang diminati siswa kelak siswa akan mencari pekerjaan dari kegiatan yang diminatinya tersebut. Latar belakang pendidikan kepala

sekolah ini juga cukup tinggi, yaitu telah menempuh jenjang S2 dibidang pendidikan kewirausahaan.

5. SLTP Negeri 1 Sidoarjo :

Apa yang dikatakan oleh kepala sekola SLTP Negeri 1 Sidoarjo tentang komite sekolah hampir sama dengan dengan kepala sekolah di SLTP lainnya, yaitu terdiri dari orang tua siswa, masyarakat, pebisnis dan pejabat pemerintah. Tetapi SLTP Negeri 1 Sidoarjo lebih mengedepankan peran orang tua siswa sebagai bagian terbesar dari anggota komite sekolah.

Persepsi pihak sekolah terhadap komite sekolah nampaknya lebih melihat peran komite sekolah sebagai badan yang dapat membantu sekolah apabila sekolah membutuhkan dana, misalnya untuk membangun laboratorium. Peran komite sekolah di SLTP Negeri 1 Sidoarjo nampaknya belum begitu dominan, karena menurut pengakuan kepala sekolah, Komite sekolah sementara ini sebatas memberikan masukan mengenai pengembangan fisik dan non fisik sekolah, belum sampai pada upaya untuk memberi masukan pada muatan kurikulum.

Pertemuan yang dilakukan antara pihak sekolah dengan komite sekolah, diadakan sebanyak 3 –4 kali dalam setahun atau ketika ada masalah penting yang harus dibicarakan (insidental).

6. SLTP Negeri 1 Krian :

Upaya yang telah dilakukan pihak sekolah untuk membentuk komite sekolah adalah dengan melibatkan orang tua siswa dan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang peduli dengan dunia pendidikan. Kepala sekolah SLTP Negeri 1 Krian berpendapat, bahwa urusan pengelolaan sekolah bukan hanya sekadar urusan pihak sekolah saja tetapi juga menjadi urusan semua orang yang berada di sekitar sekolah. Namun demikian, pihak sekolah belum memiliki pola hubungan yang cukup intens dengan pihak komite sekolah. Hal ini nampak dari pernyataan kepala sekolah yang mengatakan bahwa komite sekolah belum terlibat secara mendalam terhadap setiap urusan sekolah,

khususnya dalam penyusunan kurikulum, tetapi untuk menyusun kegiatan ekstra kurikuler, komite sekolah turut membantu memikirkannya.

Salah satu contoh bentuk keterlibatan komite sekolah dalam merumuskan kegiatan ekstra kurikuler di SLTP Negeri 1 Krian, adalah terbentuknya kegiatan ekstra kurikuler kesenian campur sari, di samping hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan belajar-mengajar.

Pertemuan antara komite sekolah dengan pihak sekolah dilakukan minimal sekali dalam enam bulan atau kalau ada hal-hal penting, seperti menjelang tahun ajaran baru. Agenda yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah membahas hal-hal yang dirasa sulit oleh sekolah untuk diatasi serta membantu sekolah dalam merumuskan program-program kegiatan siswa pada tahun ajaran baru berikutnya.

7. SLTP Negeri 2 Wonoayu :

Kepala sekolah SLTP Negeri 2 Wonoayu mengatakan bahwa sekolah merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, terutama yang berada di sekitar sekolah. Urusan sekolah pun pada saat sekarang tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah saja. Oleh karena itu sekolah mengajak para *stake holder* untuk bekerja sama membentuk komite sekolah. Anggota dari komite sekolah di SLTP Negeri 2 Wonoayu antara lain adalah: orang tua murid, tokoh masyarakat, LSM dan beberapa pengusaha *home industry* yang ada di sekitar sekolah. Pertemuan rutin antara pihak sekolah dengan komite sekolah sudah cukup sering dilakukan, terutama untuk membahas program-program pendidikan di SLTP Negeri 2 Wonoayu.

Peran komite sekolah hingga saat ini adalah telah memberi masukan pada kegiatan-kegiatan pendidikan yang bersifat dapat memberi bekal keterampilan (*life skill*) pada siswa, seperti ternak lele, gurami dan belut, jahit menjahit, sablon dan membuat kripik pisang. Komite sekolah juga membantu memberi pelatihan tentang teknik pengadaaan benih ikan serta proses pengelolaan dan pemasarannya.

8. SLTP Negeri 1 Driyorejo:

Kepala sekolah SLTP Negeri 1 Driyorejo mengakui bahwa sekolahnya sampai saat ini belum berusaha merangkul stake holder dari masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Namun komite sekolah sudah terbentuk dan anggotanya adalah: kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan dua orang siswa pengurus OSIS.

Oleh karena pembentukan komite sekolah adalah hal baru bagi sekolah, maka perannya masih belum maksimal dan pihak sekolah sendiri merasa bahwa sosialisasi tentang tugas dan peran komite sekolah masih kurang. Inisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan komite sekolah selama ini masih dominan dilakukan oleh pihak sekolah dan agenda rutin pertemuan dengan komite sekolah adalah tiap tahun ajaran baru di mana hal-hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut umumnya adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Usulan atau masukan ide dari pihak komite sekolah juga belum nampak, namun sekolah ketika mengadakan pertemuan dengan komite sekolah telah melemparkan usul untuk membangun aula.

9. SLTP Negeri 1 Manyar, Gresik :

Sekolah ini ternyata masih belum memiliki komite sekolah sebagaimana diprasyaratkan dalam MPMBS. Menurut kepala sekolah, komite sekolah sampai saat ini masih dalam tahap pembentukan, karena menurutnya komite sekolah adalah sesuatu yang baru sehingga perlu pemikiran yang matang untuk pembentukannya. Kepala sekolah di SLTP Negeri 1 Manyar mengatakan bahwa calon-calon anggota yang duduk dalam komite sekolah antara lain adalah wali murid (yang diambil dari pengurus BP3). Kepala sekolah nampaknya masih menganggap bahwa komite sekolah perannya masih sama dengan BP3. Belum ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh sekolah untuk menggalang kekuatan dari stake holder atau komite sekolah agar dapat mendukung keberlangsungan sekolah dan peningkatan mutu sekolah.

Secara ringkas variasi pembentukan peran Komite Sekolah di masing-masing subyek penelitian terangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3: Variasi Pembentukan dan Peran Komite Sekolah

No.	Nama Sekolah	Anggota Komite Sekolah	Peran Komite Sekolah
1.	SLTP Negeri 2 Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> para alumnus, dewan guru, tokoh masyarakat yang ada di sekitar wilayah sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat, orang tua siswa (wali murid) dan ada juga para ahli (dosen-dosen dari perguruan tinggi, ahli hukum, dokter, dll). Namun secara riil yang aktif sebagai komite sekolah di SLTP Negeri 2 adalah orang tua siswa 	<ul style="list-style-type: none"> Salah satu perannya adalah mengadakan penyuluhan anti narkoba kepada para siwanya. sebatas dilibatkan dalam program-program pengembangan/pembangunan sarana fisik), Namun yang lebih sering pihak sekolah mengajukan permohonan bantuan dana pada pihak komite sekolah
2.	SLTP Negeri 17 Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan komite sekolah belum tuntas dilakukan. Pertemuan antara pihak sekolah dengan unsur masyarakat (dalam hal ini adalah orang tua siswa serta tokoh masyarakat setempat) baru dilakukan satu kali. 	<ul style="list-style-type: none"> Belum sepenuhnya melaksanakan azas atau prinsip-prinsip MPMBS Kepala sekolah menganggap bahwa penyelenggaraan pendidikan di sekolah sama seperti dulu, yaitu masih menggunakan pola pendidikan yang sentralistik.
3.	SLTP Negeri 22	<ul style="list-style-type: none"> untuk sementara hanya melibatkan ketua dan pengurus BP3 (perwakilan orang tua siswa), 	<ul style="list-style-type: none"> penanggung jawab kegiatan masih dipegang oleh pihak sekolah. dalam kenyataannya yaitu selama masa uji coba, pihak sekolah lah yang masih lebih dominan (misalnya yang berinisiatif mengundang adalah pihak sekolah) dalam melaksanakan MPMBS.

4.	SLTP Negeri 30	<ul style="list-style-type: none"> • mantan pimpinan PT Cipta Karya, beberapa dosen ITS, dewan guru, para alumni dari sekolah ini, rumah sakit yang menjadi tetangga sekolah ini, kemudian juga beberapa guru SMU, karena sekolah ini juga bertetangga dengan SMU negeri 20. • Komite sekolah juga menjalin kerja sama dengan pihak perguruan tinggi, seperti UBAYA dan Universitas Airlangga. 	<ul style="list-style-type: none"> • berupaya memaksimalkan potensi lahan sekolah yang relatif luas, misalnya yang akan dijadikan program percontohan, adalah memproduksi krupuk dan membuat kolam ikan untuk bahan baku krupuk. • Program <i>life skill</i> akan diterapkan dengan usaha pembuatan krupuk tersebut.
5.	SLTP Negeri 1 Sidoarjo	<ul style="list-style-type: none"> • orang tua siswa, masyarakat, pebisnis dan pejabat pemerintah. • Tetapi SLTP Negeri 1 Sidoarjo lebih mengedepankan peran orang tua siswa sebagai bagian terbesar dari anggota komite sekolah. 	<ul style="list-style-type: none"> • peran komite sekolah sebagai badan yang dapat membantu sekolah apabila sekolah membutuhkan dana, misalnya untuk membangun laboratorium. • Peran komite sekolah di SLTP Negeri 1 Sidoarjo nampaknya belum begitu dominan, sementara ini sebatas memberikan masukan mengenai pengembangan fisik
6.	SLTP Negeri 1 Krian	melibatkan orang tua siswa dan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang peduli dengan dunia pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu contoh bentuk keterlibatan komite sekolah adalah dalam merumuskan kegiatan ekstra kurikuler di SLTP Negeri 1 Krian, kesenian campur sari. • pihak sekolah belum memiliki pola hubungan yang cukup intens dengan pihak komite sekolah. komite sekolah belum terlibat secara mendalam terhadap setiap urusan sekolah
7.	SLTP Negeri 2 Wonoayu	Anggota dari komite sekolah di SLTP Negeri 2 Wonoayu antara lain adalah: orang tua murid, tokoh masyarakat, LSM dan beberapa pengusaha <i>home industry</i> yang ada di sekitar sekolah.	<ul style="list-style-type: none"> • Peran komite sekolah hingga saat ini adalah telah memberi masukan pada kegiatan-kegiatan pendidikan yang bersifat dapat memberi bekal keterampilan (<i>life skill</i>) pada

			<p>siswa, seperti ternak lele, gurami dan belut, jahit menjahit, sablon dan membuat kripik pisang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite sekolah juga membantu memberi pelatihan tentang teknik pengadaaan benih ikan serta proses pengelolaan dan pemasarannya.
8.	SLTP Negeri 1 Manyar	<ul style="list-style-type: none"> • belum memiliki komite sekolah sebagaimana diprasyaratkan dalam MPMBS. • bahwa calon-calon anggota yang duduk dalam komite sekolah antara lain adalah wali murid (yang diambil dari pengurus BP3). 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala sekolah menganggap bahwa komite sekolah perannya masih sama dengan BP3.
9.	SLTP Negeri 1 Driyorejo	<ul style="list-style-type: none"> • anggotanya adalah: kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan dua orang siswa pengurus OSIS. 	<ul style="list-style-type: none"> • perannya masih belum maksimal dan pihak sekolah sendiri merasa bahwa sosialisasi tentang tugas dan peran komite sekolah masih kurang. • Inisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan komite sekolah selama ini masih dominan dilakukan oleh pihak sekolah

V.1.4. Mekanisme pendanaan untuk Menyelenggarakan Aktivitas Belajar-mengajar di Sekolah

Salah satu alasan diterapkannya MPMBS adalah agar sekolah lebih luwes/fleksibel dalam mengelola sumber dayanya, termasuk dalam hal ini adalah mengelola dana pendidikan yang dimilikinya. Dalam kaitan inilah maka peran serta komite sekolah sangat diperlukan, terutama membantu sekolah untuk mengelola sumber dana yang tersedia dan mencarikan terobosan-terobosan baru agar sekolah lebih mandiri dalam membiayai kegiatan proses belajar-mengajar tanpa tergantung lagi dengan bantuan pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana sekolah mengelola dana-dana yang dimilikinya dan bagaimana mekanisme pendanaan sekolah dalam rangka program MPMBS, maka berikut ini adalah pengalaman dari masing-masing sekolah yang menjadi subyek penelitian ini.

1. SLTP Negeri 2 Surabaya

Dana operasional yang diperoleh sekolah selama ini adalah dari pemerintah (melalui dana bantuan operasional atau BOMM) selain dari iuran BP3. Kepala sekolah SLTP Negeri 2 berkeyakinan bahwa pemerintah pasti tidak akan melepas tanggung jawab dalam hal pemberian dana pendidikan. Kalau ada program-program dari sekolah yang membutuhkan dana, kepala sekolah mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah, melalui dinas pendidikan. Seperti yang baru saja dilakukan adalah mengajukan permohonan kepada dinas pendidikan Jawa Timur dalam pengadaan 48 unit komputer.

Orang tua siswa juga menjadi sumber dana bagi sekolah. Iuran dari para orang tua siswa disesuaikan dengan kebutuhan program sekolah. Misalkan saja ketika ada program renovasi laboratorium bahasa, sekolah menentukan besarnya iuran yang harus dibayar, selain juga dana diambil dari iuran bulanan BP3. Bantuan dana dari orang tua siswa tersebut tidak diartikan "membebani" mereka karena sekolah menganggap bahwa orang tua adalah salah satu pilar tanggung jawab pendidikan.

Komite sekolah sampai saat ini belum memberikan sumbangan pemikirannya sehubungan dengan penggalan dana yang dibutuhkan sekolah. Kepala sekolah sendiri pun tidak percaya apabila pemerintah sampai mencabut bantuan dana operasionalnya, atau melepas tanggung jawabnya terhadap keberlangsungan hidup sekolah. Namun kepala sekolah mempunyai pemikiran untuk mengantisipasi, yaitu mendayagunakan orang tua siswa dan masyarakat, di mana kedua komponen itu harus saling bekerja sama untuk tetap meningkatkan mutu sekolah, termasuk dalam hal ini adalah menggali sumber dana untuk meningkatkan mutu sekolah.

2. SLTP Negeri 17 Surabaya

Dana yang diperoleh sekolah dari dulu hingga kini masih tetap seperti biasa, yaitu diperoleh dari pemerintah dan iuran BP3. Namun kepala sekolah telah mencoba membuat terobosan untuk mencari dana tambahan bagi pengelolaan pendidikan di sekolahnya, yaitu dengan memasukkan proposal ke beberapa perusahaan yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan. Proposal yang telah diajukan adalah ke salah satu perusahaan swasta (PT Busang, salah satu perusahaan tambang yang berkedudukan di Papua) karena menurut informasi, ada program khusus dari perusahaan tersebut untuk membantu pembiayaan pendidikan masyarakat Indonesia.

Sekolah belum memiliki pemikiran untuk mengadakan usaha guna memutar dana pendidikan, tetapi mungkin suatu saat akan mengarah ke sana, terutama apabila otonomi pendidikan memang benar-benar diterapkan. Juga belum ada terobosan atau inovasi baru sehubungan dengan penggalan dana, selain pengajuan proposal ke berbagai perusahaan yang dinilai peduli terhadap pendidikan.

3. SLTP Negeri 22 Surabaya

Mekanisme pendanaan untuk kegiatan sekolah selama ini selain mengandalkan dana dari pemerintah (BOMM) juga masih mengandalkan dana dari BP3 (iuran rutin dan BP3). Selain itu terdapat juga beberapa donatur tetap, yakni orang tua siswa yang telah ditunjuk oleh pihak sekolah.

Komite sekolah sampai saat penelitian ini berlangsung belum memberi masukan atau inovasi baru untuk dapat melakukan penggalan dana. Harapan sekolah di masa yang akan datang adalah apabila komite sekolah telah benar-benar berfungsi maka akan diupayakan mencari akses yang dapat digunakan untuk mencari dana.

4. SLTP Negeri 30 Surabaya

Dana yang diperoleh sekolah selama ini memang masih bergantung pada BP3 atau SPP serta dana bantuan dari Diknas (BOMM). Namun untuk masa yang akan datang komite sekolah dari SLTP Negeri 30 Surabaya telah

mengupayakan agar sekolah tidak tergantung lagi pada dana-dana bantuan tersebut. Untuk itu komite sekolah membuat rencana mendirikan industri kecil krupuk ikan. Proposal tentang rencana membuat industri pengolahan krupuk ikan juga telah dibuat dan akan diajukan ke beberapa perusahaan yang memiliki perhatian di bidang tersebut. Agar masyarakat di sekitar sekolah juga dapat menikmati hasil dari usaha itu, maka direncanakan pula untuk merangkul penduduk setempat yang memang kondisi ekonominya masih kurang, di mana beberapa diantaranya juga memiliki anak yang bersekolah di SLTP Negeri 30 Surabaya, untuk bersama-sama menjalankan kegiatan tersebut.

5. SLTP Negeri 1 Sidoarjo

Mekanisme pendanaan di SLTP Negeri 1 Sidoarjo semenjak diterapkannya program MPMBS dikelola bersama-sama dengan komite sekolah. Dana tersebut diperoleh dari pemerintah dan orang tua siswa.

Dalam hal mencari terobosan untuk menggali dana, pihak sekolah telah melakukan pendekatan dengan pengusaha yang ada di sekitar sekolah juga dengan pejabat pemerintah agar mereka mau meluangkan waktu dan dananya untuk bersama-sama mengembangkan kualitas sekolah melalui program MPMBS.

6. SLTPN Negeri 2 Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo

Peran komite sekolah dalam membantu memikirkan mekanisme pendanaan untuk kegiatan belajar-mengajar cukup besar. Pihak sekolah melibatkan secara langsung komite sekolah dalam penggalangan dana, tidak hanya terbatas pada tahun ajaran baru tetapi pada peringatan hari-hari besar agama. Di sadari oleh kepala sekolah SLTP Negeri 2 Wonoayu, bahwa tidak mungkin pihak sekolah membebani komite sekolah dengan permintaan sumbangan uang terus-menerus, karena komite sekolah pun sudah cukup banyak memberikan sumbangan tenaga dan waktunya untuk bersama-sama sekolah memikirkan keberlangsungan sekolah.

Adapun mekanisme pendanaan yang telah berjalan selama ini, adalah sumbangan dana diperoleh dari subsidi pemerintah (termasuk BOMM yang telah diterima pihak sekolah selama tiga periode) dan dari orang tua siswa.

Mengenai rencana ke depan agar sekolah dapat betul-betul otonom dalam hal pengadaan dana penyelenggaraan sekolah, bersama komite sekolah pihak sekolah tengah merintis usaha¹ pengelolaan peternakan dan telah memiliki kolam ikan. Komite sekolah memberi bantuan tenaga ahli, sedangkan warga sekolah yang melaksanakan kegiatan tersebut. Melalui kegiatan itu sekolah merasa yakin akan dapat berswadaya dengan melibatkan komite sekolah kelak apabila suatu saat BOMM dicabut. Tetapi pihak sekolah masih belum siap seandainya dana bantuan dari pemerintah dicabut dalam waktu dekat. Hal itu karena sekolah sampai saat ini masih banyak membutuhkan bantuan dana, terutama dalam hal menggaji guru dan karyawan sekolah.

Melalui usaha bersama yang tengah dirintis itu, sekolah juga berupaya memberi bekal kepada siswa dengan program *lifeskill*-nya di bidang usaha peternakan yang sedang dirintis.

7. SLTP Negeri 1 Krian, Kabupaten Sidoarjo

Proses pelibatan komite sekolah dalam hal pendanaan untuk kegiatan belajar mengajar, di mulai pada tahun ajaran baru, yaitu melalui permintaan uang iuran gedung. Sedangkan pendanaan yang selama ini mendukung kegiatan sekolah adalah berasal dari subsidi pemerintah (termasuk juga dana BOMM) dan sumbangan orang tua siswa, baik melalui SPP maupun BP3.

Upaya sekolah dan komite sekolah untuk mencari terobosan baru untuk menggali dana pendidikan, nampaknya belum ada. Namun sudah ada keinginan dari pihak komite sekolah untuk menjalin kerja sama dengan para pengusaha di sekitar sekolah.

8. SLTP Negeri 1 Manyar, Kabupaten Gresik

Oleh karena SLTP Negeri 1 Manyar baru merintis program MPMBS dan kepala sekolah mengaku bahwa sekolahnya belum pernah menerima

dana BOMM dari pemerintah, maka proses pengelolaan dana pendidikan dilakukan sebagaimana biasanya. Yaitu, memperoleh dana dari pemerintah serta dari iuran rutin wali murid (SPP dan BP3).

9. SLTP Negeri 1 Driyorejo, Kabupaten Gresik

Upaya untuk menggali dana bagi keberlangsungan kegiatan sekolah nampaknya sudah mulai dirintis oleh pihak sekolah dan bekerja sama dengan komite sekolah. Beberapa upaya yang tengah dirintis itu misalnya: (1) menyelenggarakan kursus komputer untuk umum, dan tentu saja wajib diikuti oleh semua siswa SLTP Negeri 1 Driyorejo; (2) mengadakan pelatihan olah raga sepak bola (*football club*) yang juga selain dapat diikuti oleh siswa-siswa SLTP juga dapat diikuti oleh umum. Usaha lain yang juga akan dirintis, dan saat ini masih dalam tahap penajajagan adalah mengadakan usaha *laundry*, di mana usaha ini juga menjadi ajang pelatihan atau penerapan program *lifeskill* bagi siswa SLTP Negeri 1 Driyorejo. Selain itu, koperasi sekolah juga akan diberdayakan kembali.

Dari upaya membuka pelatihan dan kursus seperti yang telah disebutkan di atas, tidak sedikit keuntungan yang diperoleh, meski tidak sebesar iuran BP3. Dengan demikian sekolah tersebut telah berusaha untuk terus secara aktif menggali dana bagi pengembangan sekolah.

Tabel berikut ini merangkum secara ringkas mekanisme pendanaan dalam penyelenggaraan aktivitas belajar-mengajar di sembilan sekolah.

TABEL 4: Variasi Mekanisme Pendanaan Sekolah

No.	Nama Sekolah	Mekanisme Pendanaan	Peran Komite Sekolah
1.	SLTP Negeri 2 Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Dana operasional diperoleh dari pemerintah (melalui dana bantuan operasioan atau BOMM) selain dari iuran BP3 • kepala sekolah mengantisipasi, dengan mendayagunakan orang tua siswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Komite sekolah belum memberikan sumbangan pemikirannya

2.	SLTP Negeri 17 Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> Dana yang diperoleh sekolah adalah dari pemerintah dan iuran BP3. kepala sekolah telah mencoba membuat terobosan untuk mencari dana tambahan bagi pengelolaan pendidikan di sekolahnya, yaitu dengan memasukkan proposal ke beberapa perusahaan yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan. 	Belum ada komite sekolah
3.	SLTP Negeri 22 Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme pendanaan mengandalkan pemerintah (BOMM) BP3 (iuran rutin dan BP3) serta donatur tetap, yakni orang tua siswa yang telah ditunjuk oleh pihak sekolah. 	<ul style="list-style-type: none"> Komite sekolah belum memberi masukan atau inovasi baru untuk dapat melakukan penggalan dana.
4.	SLTP Negeri 30 Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> Dana yang diperoleh sekolah bergantung pada BP3 atau SPP serta dana bantuan dari Diknas (BOMM). 	<ul style="list-style-type: none"> komite sekolah membuat rencana mendirikan industri kecil krupuk ikan.
5.	SLTP Negeri 1 Sidoarjo	<ul style="list-style-type: none"> dikelola bersama-sama dengan komite sekolah. Dana tersebut diperoleh dari pemerintah dan orang tua siswa. 	<ul style="list-style-type: none"> Komite sekolah belum berperan secara aktif untuk memikirkan upaya penggalan dana
6.	SLTP Negeri 2 Wonoayu	<ul style="list-style-type: none"> Pihak sekolah melibatkan secara langsung komite sekolah dalam penggalan dana, tidak hanya terbatas pada tahun ajaran baru tetapi pada peringatan hari-hari besar agama. sumbangan dana diperoleh dari subsidi pemerintah (termasuk BOMM yang telah diterima pihak sekolah selama tiga periode) dan dari orang tua siswa. 	<ul style="list-style-type: none"> bersama komite sekolah pihak sekolah tengah merintis usaha pengelolaan peternakan dan telah memiliki kolam ikan.
7.	SLTP Negeri 1 Krian	<ul style="list-style-type: none"> pendanaan berasal dari subsidi pemerintah (termasuk juga dana BOMM) dan sumbangan orang tua siswa, baik melalui SPP maupun BP3. 	sudah ada keinginan dari pihak komite sekolah untuk menjalin kerja sama dengan para pengusaha di sekitar sekolah.

8.	SLTP Negeri 1 Manyar	<ul style="list-style-type: none"> • dana pendidikan diperoleh dari pemerintah serta dari iuran rutin wali murid (SPP dan BP3). 	Komite sekolah belum berperan aktif
9.	SLTP Negeri 1 Driyorejo	<ul style="list-style-type: none"> • menggali dana bagi keberlangsungan kegiatan sekolah nampaknya sudah mulai dirintis oleh pihak sekolah dan bekerja sama dengan komite sekolah 	<p>Bersama komite sekolah menyelenggarakan program rintisan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan kursus komputer • mengadakan pelatihan olah raga sepak bola (<i>football club</i>) • Usaha lain yang juga akan dirintis, dan saat ini masih dalam tahap penjajagan adalah mengadakan usaha <i>laundry</i>, di mana usaha ini juga menjadi ajang pelatihan atau penerapan program <i>lifeskill</i> bagi siswa SLTP Negeri 1 Driyorejo. • Akan memberdayakan koperasi sekolah .

V.1.5. Manfaat yang Diperoleh Sekolah Dengan Diterapkannya Program MPMBS

Meskipun MPMBS merupakan program baru dalam arena pendidikan formal kita, tetapi program ini patut diacungi jempol karena apabila diterapkan dengan sungguh-sungguh, manfaatnya sangat besar bagi semua warga sekolah. Bagi kepala sekolah dan dewan guru, program ini dapat dikembangkan sesuai dengan prakarsa, kreativitas dan otoritas keilmuan sebagai seorang pendidik. Bagi siswa, program MPMBS sangat memberi ruang bagi kreativitas siswa dalam mengembangkan bakat dan pengetahuannya, serta iklim demokratis dapat ditumbuhkan dan diajarkan dalam keseharian siswa di sekolah.

Untuk mengetahui manfaat apa saja yang telah diperoleh warga sekolah sehubungan dengan diterapkannya program MPMBS, dapat ditelusuri melalui penuturan dari masing-masing kepala sekolah yang menjadi subyek penelitian.

1. SLTP Negeri 2 Surabaya

Penerapan MPMBS telah membawa perubahan seperti perbaikan fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan, seperti laboratorium bahasa, laboratorium komputer, ada bimbingan belajar untuk peningkatan prestasi belajar dan penambahan kegiatan ekstra kurikuler.

Apabila tidak dikaitkan dengan komite sekolah, hal-hal positif yang didapat sekolah dengan diterapkannya program MPMBS antara lain: (1) strategi pembelajaran mengarah pada diberinya kebebasan guru untuk berkreasi; fasilitas penunjang belajar lebih baik, pengaktifan ekstra kurikuler, dilakukannya pembenahan lingkungan sekolah seperti penghijauan agar murid lebih betah dan senang berada di sekolah.

Beberapa harapan yang diinginkan pihak sekolah dengan adanya program MPMBS adalah : (1) adanya peningkatan kinerja warga sekolah, (2) kesejahteraan guru lebih baik; (3) adanya pakar pendidikan yang dapat memberikan arahan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; (3) iklim belajar menjadi lebih aman, nyaman, dan menyenangkan

2. SLTP Negeri 17 Surabaya

Oleh karena kepala sekolah belum merasa telah melaksanakan program MPMBS dengan benar, maka hal-hal positif yang diperolehnya dari program ini bagi peningkatan mutu sekolah juga belum nampak.

3. SLTPN Negeri 22 Surabaya

Menurut kepala sekolah SLTP Negeri 22 Surabaya dengan adanya program MPMBS suasana belajar dan iklim sekolah nampak lebih baik. Beberapa diantaranya yang berubah menjadi lebih baik, yaitu murid-murid menjadi lebih tertib belajar, begitu pula para guru semakin inovatif dalam

memberikan materi pengajaran. Namun untuk pegawai administrasi dan pegawai lainnya belum ada perubahan yang berarti di antara mereka.

Oleh karena MPMBS di SLTP Negeri 22 lebih menekankan pada peningkatan tata tertib dan kedisiplinan, maka hal itu sangat dirasakan manfaat positifnya. Salah satu contoh adalah guru menjadi lebih disiplin, tingkat kehadiran guru di kelas juga cukup baik dan guru menjadi lebih mampu menuangkan ide-ide kreatifnya. Sedangkan bagi murid, telah ada buku saku tentang tata tertib sekolah yang mana jika tata tertib itu dilanggar maka siswa akan diberi hukuman.

4. SLTP Negeri 30 Surabaya

Pihak kepala sekolah mengakui bahwa dengan adanya program MPMBS ini maka guru menjadi lebih berdaya, begitu pula murid, merasa kreativitasnya lebih terpacu. Dengan MPMBS kesempatan guru untuk meningkatkan kesejahteraannya menjadi lebih terbuka. Misalnya dengan memberikan insentif bagi guru yang mau memberi tambahan belajar kepada siswa-siswanya yang memang masih membutuhkan bimbingan belajar. Sebaliknya, apabila guru memiliki semangat yang tinggi untuk mendidik siswa, maka siswanya pun akan senang bersekolah dan menjadi betah tinggal lebih lama di sekolah.

SLTP ini letaknya boleh dikatakan relatif cukup jauh dari pusat kota dan lokasinya dikelilingi oleh sawah. Dengan kondisi fisik seperti itu, maka tak heran pula apabila kemampuan finansial orang tua siswa juga tidak setinggi orang tua yang anaknya bersekolah di SLTP lain di Surabaya. Dengan kondisi masyarakat di sekitar SLTP Negeri 30 yang sebagian berada di lapisan bawah, menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa sekolah ini cenderung terbelakang dan kurang maju. Namun dengan diterapkannya program MPMBS secara konsisten maka *image* sekolah yang semula buruk, menjadi lebih baik saat ini. Dan dengan pernah diwawancarainya kepala sekolah ini oleh salah satu stasiun TV karena prestasinya mengelola sekolah, Akibatnya jumlah siswa yang diterima atau jumlah kelas yang semula 15 bertambah menjadi 22 kelas.

lebih banyak yang bersifat inovatif dan kreatif dan iklim demokratis lebih nampak dalam kehidupan siswa. Contohnya adalah ketika terjadi pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS.

Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan bagi seluruh warga sekolah maka Kepala sekolah SLTP Negeri 1 Sidoarjo juga berupaya memberikan pemahaman kepada guru dan orang tua siswa, bahwa keberhasilan pendidikan siswa, tidak sekadar diukur dari nilai akademisnya tetapi yang terpenting adalah bagaimana agar siswa bisa mengembangkan potensi siswa sesuai dengan bakatnya masing-masing.

Namun yang menjadi kekhawatiran kepala sekolah adalah pada soal pendanaan, dimana menurutnya pemerintah jangan terlalu cepat memutuskan bantuannya. Selain itu, kontrol tentang standar keberhasilan dari program MPMBS ini harus terus menerus dipantau oleh pemerintah.

6. SLTP Negeri 2 Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo

Cukup banyak hal positif yang didapat warga sekolah dengan adanya program MPMBS. Bagi kepala sekolah, dengan adanya komite sekolah dapat membantu terciptanya transparansi kegiatan atau program sekolah serta mendukung akuntabilitas publik terhadap kebijakan sekolah. Bagi guru, dengan adanya program MPMBS ini dapat membantu meringankan tugas guru, terutama dengan adanya komite sekolah yang berperar: dalam memberi saran, pendapat dalam melaksanakan kegiatan evaluasi program sekolah.

MPMBS ini juga menciptakan iklim yang lebih demokratis di sekolah, di mana baik guru, kepala sekolah maupun siswa dapat saling memberi ruang bagi terjalinnya komunikasi yang harmonis di antara mereka. Di samping itu, guru merasa lebih memiliki prakarsa dan dapat mengembangkan kreativitasnya dalam proses belajar-mengajar karena guru tidak lagi harus terpaku pada kurikulum yang ada dan guru dapat lebih leluasa memberikan materi pelajaran dengan lebih berbobot.

Bagi siswa, dengan adanya program MPMBS ini berdampak positif. Beberapa hal misalnya, perkelahian antar siswa menjadi berkurang dan bahkan sudah tidak terdengar lagi karena jadwal tambahan kegiatan dari

sekolah menyebabkan mereka sibuk di sekolah dan waktu senggang yang tidak bermanfaat berkurang. Di samping itu, minat dan potensi siswa di kegiatan ekstrakurikuler telah terwadahi dengan baik, karena sekolah telah berusaha menampung aspirasi siswa untuk dapat mengembangkan bakat yang dimilikinya. Selain kedua hal di atas, yang juga cukup menggembirakan adalah meningkatnya indeks prestasi belajar siswa baik di tingkat lokal maupun daerah.

7. SLTP Negeri 1 Krian , Kabupaten Sidoarjo

Hal-hal positif yang diperoleh sekolah dengan diterapkannya MPMBS salah satu diantaranya adalah beban sekolah menjadi lebih ringan, karena ada komite sekolah yang membantu memikirkan pemecahan masalah sekolah serta memberi masukan untuk mengembangkan kualitas sekolah.

Secara konkrit, hal positif yang bisa diperoleh kepala sekolah, memudahkan untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya kepada komite sekolah, sehingga mendorong terciptanya transparansi dan pertanggungjawaban sekolah secara langsung kepada masyarakat.

Bagi guru, dengan adanya MPMBS dapat memperkaya pandangan guru sebab cukup banyak masukan dari komite sekolah dalam pengembangan proses belajar mengajar.

Bagi siswa, program MPMBS ini dapat meningkatkan prestasi belajar mereka, dan NEM siswa SLTP Negeri 1 Krian ini relatif cukup tinggi dibandingkan dengan SLTP lainnya. Di samping itu, siswa menjadi lebih kerasan tinggal di sekolah karena banyak kegiatan ekstra kurikuler yang dapat diikuti dan menarik minat mereka, misalnya dengan adanya campursari dan seni hadrah.

8. SLTP Negeri 1 Manyar, Kabupaten Gresik

Oleh karena SLTP Negeri 1 Manyar belum secara menyeluruh melaksanakan program MPMBS, namun kepala sekolah sudah memiliki beberapa rencana dalam upaya untuk mengembangkan *life skill* siswa. Salah satunya adalah dengan melihat potensi pengembangan kerja yang ada di

sekeliling sekolah, salah satu contohnya adalah akan mengajak kerja sama pemilik bengkel otomotif yang ada di dekat sekolah. Selain bengkel, di sekitar sekolah juga ada *home industry* berupa usaha bordir dan kerajinan jahit. Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Manyar juga berencana untuk mengajak kerja sama usaha bordir tersebut untuk membantu melatih siswa-siswa SLTP Negeri 1 agar dapat menjahit bordir.

9. SLTP Negeri 1 Driyorejo, Kabupaten Gresik

Hasil positif dengan diterapkannya program MPMBS salah satu diantaranya adalah munculnya kreativitas guru. Melalui program ini kepala sekolah meminta kepada semua guru untuk membuat silabus materi pelajaran, dari silabus tersebut para guru diberi keleluasaan untuk menyampaikan atau memberikan materi pelajaran dengan lebih inovatif, *up to date* dan sesuai dengan pemahaman siswa masing-masing. Sebagai contoh, dalam hal penyampaian pelajaran bahasa daerah, guru-guru di sekolah ini telah mencoba menggunakan metode belajar yang menyenangkan bagi siswa, yaitu memadukan dengan unsur-unsur seni, sehingga siswa lebih bersemangat dalam menerima pelajaran bahasa daerah. Program MPMBS ini juga membawa dampak positif bagi guru, di mana mereka sering memperoleh undangan untuk mengikuti penataran, pelatihan dan sosialisasi tentang pelaksanaan MPMBS.

Dengan adanya MPMBS, hal lain yang juga cukup berarti bagi sekolah yaitu dengan terbangunnya laboratorium bahasa dan elektro serta aula. Bangunan itu semua adalah hasil dari penggalangan dana yang dilakukan oleh komite sekolah.

Secara ringkas, hal-hal positif yang diperoleh masing-masing sekolah dengan adanya program MPMBS adalah seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini.

lebih banyak yang bersifat inovatif dan kreatif dan iklim demokratis lebih nampak dalam kehidupan siswa. Contohnya adalah ketika terjadi pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS.

Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan bagi seluruh warga sekolah maka Kepala sekolah SLTP Negeri 1 Sidoarjo juga berupaya memberikan pemahaman kepada guru dan orang tua siswa, bahwa keberhasilan pendidikan siswa, tidak sekadar diukur dari nilai akademisnya tetapi yang terpenting adalah bagaimana agar siswa bisa mengembangkan potensi siswa sesuai dengan bakatnya masing-masing.

Namun yang menjadi kekhawatiran kepala sekolah adalah pada soal pendanaan, dimana menurutnya pemerintah jangan terlalu cepat memutuskan bantuannya. Selain itu, kontrol tentang standar keberhasilan dari program MPMBS ini harus terus menerus dipantau oleh pemerintah.

6. SLTP Negeri 2 Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo

Cukup banyak hal positif yang didapat warga sekolah dengan adanya program MPMBS. Bagi kepala sekolah, dengan adanya komite sekolah dapat membantu terciptanya transparansi kegiatan atau program sekolah serta mendukung akuntabilitas publik terhadap kebijakan sekolah. Bagi guru, dengan adanya program MPMBS ini dapat membantu meringankan tugas guru, terutama dengan adanya komite sekolah yang berperan dalam memberi saran, pendapat dalam melaksanakan kegiatan evaluasi program sekolah.

MPMBS ini juga menciptakan iklim yang lebih demokratis di sekolah, di mana baik guru, kepala sekolah maupun siswa dapat saling memberi ruang bagi terjalannya komunikasi yang harmonis di antara mereka. Di samping itu, guru merasa lebih memiliki prakarsa dan dapat mengembangkan kreativitasnya dalam proses belajar-mengajar karena guru tidak lagi harus terpaku pada kurikulum yang ada dan guru dapat lebih leluasa memberikan materi pelajaran dengan lebih berbobot.

Bagi siswa, dengan adanya program MPMBS ini berdampak positif. Beberapa hal misalnya, perkelahian antar siswa menjadi berkurang dan bahkan sudah tidak terdengar lagi karena jadwal tambahan kegiatan dari

sekeliling sekolah, salah satu contohnya adalah akan mengajak kerja sama pemilik bengkel otomotif yang ada di dekat sekolah. Selain bengkel, di sekitar sekolah juga ada *home industry* berupa usaha bordir dan kerajinan jahit. Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Manyar juga berencana untuk mengajak kerja sama usaha bordir tersebut untuk membantu melatih siswa-siswa SLTP Negeri 1 agar dapat menjahit bordir.

9. SLTP Negeri 1 Driyorejo, Kabupaten Gresik

Hasil positif dengan diterapkannya program MPMBS salah satu diantaranya adalah munculnya kreativitas guru. Melalui program ini kepala sekolah meminta kepada semua guru untuk membuat silabus materi pelajaran, dari silabus tersebut para guru diberi keleluasaan untuk menyampaikan atau memberikan materi pelajaran dengan lebih inovatif, *up to date* dan sesuai dengan pemahaman siswa masing-masing. Sebagai contoh, dalam hal penyampaian pelajaran bahasa daerah, guru-guru di sekolah ini telah mencoba menggunakan metode belajar yang menyenangkan bagi siswa, yaitu memadukan dengan unsur-unsur seni, sehingga siswa lebih bersemangat dalam menerima pelajaran bahasa daerah. Program MPMBS ini juga membawa dampak positif bagi guru, di mana mereka sering memperoleh undangan untuk mengikuti penataran, pelatihan dan sosialisasi tentang pelaksanaan MPMBS.

Dengan adanya MPMBS, hal lain yang juga cukup berarti bagi sekolah yaitu dengan terbangunnya laboratorium bahasa dan elektro serta aula. Bangunan itu semua adalah hasil dari penggalangan dana yang dilakukan oleh komite sekolah.

Secara ringkas, hal-hal positif yang diperoleh masing-masing sekolah dengan adanya program MPMBS adalah seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini.

TABEL 5: Hal-hal Positif yang Diperoleh Sekolah melalui Program MPMBS

NAMA SEKOLAH	HAL-HAL POSITIF YANG DIPEROLEH
SLTP Negeri 2 Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • perbaikan fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan, seperti laboratorium bahasa, laboratorium komputer, • ada bimbingan belajar untuk peningkatan prestasi belajar dan penambahan kegiatan ekstra kurikuler. • strategi pembelajaran mengarah pada diberinya kebebasan guru untuk berkreasi • dilakukannya pembenahan lingkungan sekolah seperti penghijauan agar murid lebih betah dan senang berada di sekolah.
SLTP Negeri 17 Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada hal positif yang didapat sekolah karena belum melaksanakan program MPMBS dengan benar.
SLTP Negeri 22 Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • murid-murid menjadi lebih tertib belajar, • para guru semakin inovatif dalam memberikan materi pengajaran. • Namun untuk pegawai administrasi dan pegawai lainnya belum ada perubahan yang berarti di antara mereka. • MPMBS diterapkan dalam upaya untuk menekankan pada peningkatan ta'a tertib dan kedisiplinan, • guru menjadi lebih disiplin, tingkat kehadiran guru di kelas juga cukup baik • guru menjadi lebih mampu menuangkan ide-ide kreatifnya. • bagi murid, telah ada buku saku tentang tata tertib sekolah yang mana jika tata tertib itu dilanggar maka siswa akan diberi hukuman.
SLTP Negeri 30 Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • guru menjadi lebih berdaya, begitu pula murid, merasa kreativitasnya lebih terpacu. • kesempatan guru untuk meningkatkan kesejahteraannya menjadi lebih terbuka. Misalnya dengan memberikan insentif bagi guru yang mau memberi tambahan belajar kepada siswa-siswanya yang memang masih membutuhkan bimbingan belajar. • <i>image</i> sekolah yang semula buruk, menjadi lebih baik saat ini. • jumlah siswa yang diterima bertambah atau jumlah kelas yang semula 15 bertambah menjadi 22 kelas.
SLTP Negeri 1 Sidoarjo	<ul style="list-style-type: none"> • terbangunnya sarana olah raga karena ada bantuan finansial yang diperoleh dari komite sekolah • dapat meringankan beban sekolah dengan masuknya sumbangan pikiran dari komite sekolah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang transparan bagi pengembangan kualitas

	<p>sekolah.</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa lebih banyak yang bersifat inovatif dan kreatif dan iklim demokratis lebih nampak dalam kehidupan siswa. Contohnya adalah ketika terjadi pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS.
SLTP Negeri 2 Wonoayu	<ul style="list-style-type: none"> komite sekolah dapat membantu terciptanya transparansi kegiatan atau program sekolah serta mendukung akuntabilitas publik terhadap kebijakan sekolah. dapat membantu meringankan tugas guru, terutama dengan adanya komite sekolah yang berperan dalam memberi saran, pendapat dalam melaksanakan kegiatan evaluasi program sekolah. tercipta iklim yang lebih demokratis di sekolah, di mana baik guru, kepala sekolah maupun siswa terjalin komunikasi yang harmonis di antara mereka. guru merasa lebih memiliki prakarsa dan dapat mengembangkan kreativitasnya dalam proses belajar-mengajar karena guru tidak lagi harus terpaksa pada kurikulum yang ada dan guru dapat lebih leluasa memberikan materi pelajaran dengan lebih berbobot.
SLTP Negeri 1 Krian	<ul style="list-style-type: none"> komite sekolah membantu memikirkan pemecahan masalah sekolah serta memberi masukan untuk mengembangkan kualitas sekolah. Bagi guru, dapat memperkaya pandangan guru sebab cukup banyak masukan dari komite sekolah dalam pengembangan proses belajar mengajar. Bagi siswa, dapat meningkatkan prestasi belajar mereka, dan NEM siswa SLTP Negeri 1 Krian ini relatif cukup tinggi dibandingkan dengan SLTP lainnya. siswa menjadi lebih kerasan tinggal di sekolah karena banyak kegiatan ekstra kurikuler yang dapat diikuti dan menarik minat mereka, misalnya dengan adanya campursari dan seni hadrah.
SLTP Negeri 1 Manyar	<ul style="list-style-type: none"> kepala sekolah sudah memiliki beberapa rencana dalam upaya untuk mengembangkan <i>life skill</i> siswa. Salah satunya adalah dengan melihat potensi pengembangan kerja yang ada di sekeliling sekolah
SLTP Negeri 1 Driyorejo	<ul style="list-style-type: none"> meminta kepada semua guru untuk membuat silabus materi pelajaran, dari silabus tersebut para guru diberi keleluasaan untuk menyampaikan atau memberikan materi pelajaran dengan lebih inovatif, <i>up to date</i> dan sesuai dengan pemahaman siswa masing-masing. guru sering memperoleh undangan untuk

	<p>mengikuti penataran, pelatihan dan sosialisasi tentang pelaksanaan MPMBS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • terbangunnya laboratorium bahasa dan elektro serta aula. Bangunan itu semua adalah hasil dari penggalangan dana yang dilakukan oleh komite sekolah.
--	--

V.2. Pembahasan

Setelah mengetahui berbagai informasi seputar pelaksanaan MPMBS di masing-masing sekolah yang terambil sebagai subyek penelitian, maka terdapat beberapa hal yang menarik untuk dibahas.

1. Mengenai pelaksanaan program MPMBS, ternyata tidak semua sekolah yang terambil sebagai subyek penelitian merasa bahwa sekolahnya ditunjuk sebagai sebagai tempat uji coba pelaksanaan program tersebut. Bahkan ada kepala sekolah yang merasa bahwa dengan diikutkannya penataran tentang pelaksanaan MPMBS, maka otomatis sekolah harus melaksanakan program MPMBS. Sebaliknya, cukup banyak sekolah yang harus mengajukan proposal ke kantor Diknas lebih dulu agar dapat memperoleh dana bantuan pelaksanaan program MPMBS. Tidak konsistennya proses seleksi pada sekolah-sekolah yang menjadi tempat uji coba pelaksanaan MPMBS dapat mencerminkan masih belum tertatanya manajemen dan mekanisme pelaksanaan program tersebut di tingkat pusat. Bagi sekolah-sekolah yang memang berusaha mengajukan proposal pelaksanaan MPMBS nampak bahwa mereka memang benar-benar siap menerapkan program tersebut dan mereka konsisten dan memiliki fokus dalam menjalankan program-programnya. Sebaliknya, pada sekolah-sekolah yang tidak mengajukan proposal, belum nampak adanya fokus dan konsistensi kegiatan yang akan dijadikan sasaran dalam peningkatan mutu di sekolah.
2. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendidikan Nasional Jawa Timur, kesembilan sekolah yang dijadikan subyek dalam penelitian ini semuanya adalah penerima dana BOMM dan diharapkan pula mereka melaksanakan program MPMBS (karena dana tersebut ditujukan untuk merealisasikan pelaksanaan MPMBS). Namun, kenyataan yang diperoleh

di lapangan menunjukkan bahwa belum seluruh sekolah merasa mendapat dana BOMM dan ada juga yang belum melaksanakan pembentukan komite sekolah, sebagai salah satu prasyarat dilaksanakannya program MPMBS, meskipun di antara mereka ada yang telah memperoleh dana BOMM. SLTP Negeri 17 dan 22 Surabaya serta SLTP Negeri 1 Manyar, Gresik, sampai penelitian ini dilakukan, belum sepenuhnya membentuk komite sekolah. Bahkan ada sekolah yang menganggap bahwa komite sekolah cukup diwakili oleh ketua dan pengurus BP3. Dengan pemahaman yang demikian maka jiwa dari program MPMBS belum sepenuhnya dipahami oleh sekolah-sekolah yang melaksanakan program tersebut. Apabila menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat, maka komite sekolah adalah salah satu sarana untuk menyadarkan masyarakat agar peduli terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam dunia pendidikan.

3. Meskipun tujuan MPMBS untuk jangka panjang adalah kemandirian sekolah, termasuk mandiri dalam menggali dana operasional sekolah, namun oleh karena pelaksanaan program ini baru berjalan antara satu hingga dua tahun, maka mekanisme pendanaan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di hampir setiap sekolah yang menjadi subyek penelitian ini masih bergantung pada pemerintah dan iuran pendidikan dari orang tua siswa (BP3). Yang cukup menarik, ada satu sekolah, yaitu SLTP Negeri 1 Driyorejo yang sudah mencoba merintis penggalangan dana secara mandiri dengan menyelenggarakan unit-unit usaha, seperti kursus komputer dan mendirikan klub sepak bola, di samping akan membuka unit usaha *laundry* dan koperasi sekolah. Apa yang dilakukan oleh SLTP Negeri 1 Driyorejo mungkin dapat dijadikan contoh bagi sekolah-sekolah lain agar secara kreatif menggali potensinya sendiri tanpa harus terus menerus mengandalkan bantuan dari pemerintah maupun orang tua siswa. Ini bukan berarti sekolah kemudian cenderung berorientasi bisnis, tetapi yang menjadi titik tumpu adalah bagaimana sekolah dapat menjalankan usaha sekaligus dapat mengasah kemampuan dan melatih keterampilan siswa melalui unit-unit usaha yang dijalankannya tersebut.

4. Hal-hal positif yang diperoleh sekolah dengan melaksanakan program MPMBS nampaknya cukup banyak dan bervariasi. Penerapan program ini bagi intern sekolah sangat bermanfaat terutama membantu warga sekolah untuk lebih luwes/fleksibel dalam menerjemahkan kurikulum dan melaksanakannya. Kreativitas kepala sekolah, guru, dan murid berkembang dalam kegiatan-kegiatan sekolah karena yang menjadi patokan dalam bertindak bukan lagi berorientasi pada keharusan untuk memperoleh NEM yang tinggi tetapi peningkatan mutu pada segala aspek kemampuan siswa, baik itu kemampuan akademis maupun kemampuan siswa untuk menguasai *lifskill* yang berguna bagi pengembangan potensi siswa di masa datang.
-

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab V, maka dapat disimpulkan :

1. Mekanisme pelaksanaan MPMBS di sembilan sekolah yang menjadi subyek penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua jalur. Pertama dengan mengajukan proposal tentang upaya peningkatan mutu sekolah yang diajukan ke Kantor Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Timur, dan kedua hanya dengan mengikuti penataran tentang pelaksanaan program MPMBS sudah dianggap oleh kepala ssekolah bahwa sekolahnya menerapkan program MPMBS. Kedua jalur tersebut mungkin bukan berdasarkan ketetapan dari Kantor Dinas Pendidikan Nasional, namun paling tidak apa yang dikemukakan oleh masing-masing kepala sekolah tersebut menjadi cerminan bahwa sosialisasi pelaksanaan MPMBS masih belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masing-masing pimpinan sekolah.
2. Bentuk kerja sama yang dilakukan dengan komite sekolah dari masing-masing sekolah cukup bervariasi, namun sebagian besar sekolah lebih banyak yang berinisiatif untuk meminta bantuan dana dari pihak komite sekolah terutama guna membangun sarana fisik sekolah (membangun laboratorium, aula, mushollah, dan sebagainya). Meskipun ada beberapa sekolah yang memiliki komite sekolah cukup baik, tetapi peran komite sekolah masih banyak yang pasif dan nampak belum memiliki visi dan misi yang jelas tentang upaya pengembangan sekolah di masa yang akan datang.
3. Mekanisme pendanaan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di hampir semua sekolah yang menjadi subyek penelitian ini masih bergantung pada subsidi dari pemerintah dan dana dari iuran orang tua siswa (BP3). Peran komite sekolah untuk ikut membantu mengatur mekanisme pendanaan masih belum nampak, meskipun memang ada beberapa sekolah

yang telah bekerja sama dengan komite sekolahnya untuk mengatur pendanaan sekolah dan bahkan membuat unit-unit usaha yang dapat memberi pemasukkan bagi sekolah (*income generating*).

4. Manfaat positif yang diperoleh warga sekolah dari pelaksanaan program MPMBS cukup banyak. Pada umumnya sekolah cukup antusias dalam melaksanakan program tersebut dan banyak inisiatif serta ide-ide kreatif yang muncul dari warga sekolah setelah program ini diterapkan.

VI.2. Saran

Oleh karena program MPMBS ini baru dilaksanakan dalam kurun waktu satu hingga dua tahun, maka tentu saja banyak hal yang memang harus dibenahi dan dievaluasi pelaksanaannya agar untuk masa-masa yang akan datang program ini dapat lebih efektif dan berdaya guna. Meskipun penelitian ini tidak bertujuan sebagai alat untuk memonitor atau mengevaluasi pelaksanaan program MPMBS, tidak ada salahnya para *stake holder* pendidikan mengambil manfaat dari hasil penelitian ini. Adapun hal-hal yang dapat disarankan guna perbaikan pelaksanaan program MPMBS antara lain adalah:

1. Perlu ada koordinasi yang matang antara pihak sekolah dengan pemerintah sebagai pemrakarsa program MPMBS pada tahap awal. Karena dari hasil penelitian ini, masih ada sekolah yang belum menetapkan fokus sasaran sebagai pijakan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
2. Sosialisasi pelaksanaan program MPMBS dan pembentukan komite sekolah nampaknya harus terus menerus dilakukan, terutama untuk menggugah kesadaran masyarakat maupun warga sekolah tentang pentingnya interaksi dan kerja sama di antara mereka. Apa yang telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional lewat kampanye pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah seperti yang ditayangkan di televisi dirasa sudah cukup baik. Namun mungkin yang lebih penting lagi adalah menggugah kesadaran orang tua dan masyarakat sekitar untuk lebih aktif memikirkan masa depan dan kualitas pendidikan anak-

anaknyanya. Khusus bagi sekolah-sekolah yang berada di perkotaan (seperti SLTP Negeri 2 Surabaya dan SLTP Negeri 1 Sidoarjo) pihak sekolah harus lebih sering mengajak orang tua siswa, sebagai salah satu komponen dalam komite sekolah, untuk tidak saja memberikan uangnya bagi kepentingan pendidikan anaknya, tetapi lebih dari itu adalah sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

3. Pembuatan Rencana Strategis, Jangka Pendek, Menengah dan Panjang (termasuk penetapan visi dan misi sekolah) perlu juga diterapkan dalam pelaksanaan program MPMBS agar proses peningkatan mutu sekolah dapat dijalankan dengan baik. Dengan adanya Renstra tersebut maka program MPMBS dapat lebih terfokus sehingga memudahkan sekolah serta komite sekolah dalam menentukan program-program kerjanya.

.....

DAFTAR KEPUSTAKAAN:

1. Asriwandari, Hesti, 1998, ***Kecenderungan Munculnya Perilaku Ritualisme pada Guru Sekolah Dasar Negeri***, Thesis Program Pascasarjana, Program Studi Sosiologi Universitas Indonesia, Jakarta.
2. Darmaningtyas, 1999, ***Pendidikan Pada dan Setelah Krisis***, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
3. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 2002, ***Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Konsep Dasar***, Jakarta
4. Drost, S.J, J.I.G.M, 1998, ***Sekolah: Mengajar atau Mendidik ?***, Universitas Sanata Dharma dan Kanisius: Yogyakarta.
5. Mulyasa, 2002, ***Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep Strategi dan Implementasi***, Remaja Rosdakarya, Bandung
6. Prihadiyoko, Imam, ***Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Di bawah Bayang-Bayang dan Kejaran Waktu***, Kompas, 17 Oktober 2000.
7. Usman, Widodo (ed.), 2000, ***Membongkar 'Mitos' Masyarakat Madani***, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
8. Sindunata (ed.), 2000, ***Menggagas Paradigma Baru Pendidikan***, Kanisius: Yogyakarta.
9. ***Kewenangan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Dati II***, Kompas, 17 – 20 Oktober 2000, hal. 9, kol.9

Lampiran :

DAFTAR PERTANYAAN (GUIDE INTERVIEW)

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah) di sekolah yang Bapak/Ibu pimpin ?

(Untuk pewawancara, pertanyaan diarahkan pada hal-hal berikut ini) :

- a. kronologis dipilihnya sekolah ini menjadi salah satu tempat uji-coba MPMBS, Atau kronologis dimulainya sekolah ini menerapkan MPMBS (tetapi kalau misalnya sekolah yang bersangkutan belum menerapkan MPMBS, tanyakan mengapa demikian dan adakah upaya yang dilakukan pihak sekolah menuju pengelolaan MPMBS. Apabila memang sekolah yang bersangkutan belum menerapkan MPMBS, akhiri wawancara dan ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan).

- b. siapa saja pihak-pihak (*stake holder*) yang sudah diajak untuk bekerjasama dalam melaksanakan MPMBS ?

(Untuk pewawancara: sebelumnya tanyakan lebih dulu apakah sekolah merasa bahwa urusan pengelolaan sekolah hanya menjadi tanggung jawab sekolah ? Apabila YA, mengapa demikian dan apabila TIDAK, lalu siapa yang bertanggung jawab atau ikut berperan dalam kemajuan/pengembangan sekolah di masa yang akan datang ?)

- apabila pihak sekolah belum mengajak atau mengaktifkan peran *stake holder*, upaya-upaya apa yang telah dilakukan pihak sekolah dalam melaksanakan MPMBS ? Adakah rencana untuk mengaktifkan peran *stake holder* ? Apabila ada rencana untuk itu, apa yang akan dilakukan dan bagaimana pihak sekolah dapat merealisasikan rencana tersebut ?

- c. Apakah para *stake holder* tersebut juga berperan sebagai komiter sekolah ?

(Untuk pewawancara: apabila pihak sekolah belum menyebut /menyinggung peran komite sekolah, tanyakan apakah sekolah telah melibatkan: orang tua murid, anggota masyarakat di sekitar sekolah, tokoh-tokoh masyarakat di sekitar sekolah, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat di sekitar sekolah yang memiliki usaha produktif, dan pihak-pihak lain yang ada serta merasa bagian dari lingkungan sekolah, untuk membantu memikirkan pengelolaan sekolah yang lebih mandiri dan otonom/tidak selalu bergantung pada pemerintah)

- d. Apabila pertanyaan C dijawab TIDAK oleh informan, maka Pihak-pihak mana sajakah atau siapa sajakah yang termasuk dalam komite sekolah ? Tetapi Apabila sekolah TIDAK melibatkan pihak-pihak yang telah disebutkan di atas, tanyakan, bagaimana cara sekolah menerapkan program MPMBS selama ini ?

- e. Bagaimanakah skema atau alur hubungan kerja sama antara sekolah dengan para *stake holder* dan juga komite sekolah?
(Untuk pewawancara, apabila sekolah memang belum melibatkan *stake holder* atau komite sekolah dalam pengelolaan sekolah, dengan siapa saja sekolah bekerja sama dalam melaksanakan MPMBS ?)
- f. bagaimana atau apa saja input (masukan), proses dan output (keluaran atau hasil yang diharapkan) dari pelaksanaan MPMBS;
2. Oleh karena salah satu tujuan MPMBS adalah meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui keputusan bersama, atau singkatnya berupaya membangkitkan kepedulian dan memberdayakan masyarakat di bidang pendidikan, maka :
- Apakah dan bagaimana peran yang telah dimainkan oleh komite sekolah selaku wakil masyarakat dalam pelaksanaan MPMBS di sekolah yang bapak/ibu pimpin ? (apakah juga termasuk hal-hal berikut ini: [1] membantu memberi masukan pada materi belajar di sekolah (bagaimana cara mereka berperan), memberi masukan untuk dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar di kelas/sekolah (bagaimana cara mereka berperan); atau memberi masukan pada kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya / secara umum di sekolah (bagaimana cara mereka berperan) ?)
 - Seberapa sering pihak sekolah (dalam hal ini adalah guru, kepala sekolah, siswa dan petugas administrasi) bertemu dengan pihak komite sekolah atau seberapa sering dilakukan pertemuan antara dewan sekolah dengan pihak pengelola sekolah ?
 - Dalam pertemuan tersebut agenda-agenda (pertemuan) apa saja yang cukup dominan menjadi pembicaraan ?

Untuk pewawancara: apabila pihak sekolah belum mengaktifkan peran *stake holder* atau komite/dewan sekolah, bagaimanakah upaya yang sedang atau akan dilakukan agar sekolah dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui keputusan bersama, atau singkatnya berupaya membangkitkan kepedulian dan memberdayakan masyarakat di bidang pendidikan ?

3. Program MPMBS juga menekankan tentang pentingnya sekolah dalam mencari sumber dana sendiri yang dapat digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas sekolah. Untuk itu:
- Apakah komite sekolah juga ikut membantu memikirkan mekanisme pendanaan untuk seluruh kegiatan belajar-mengajar dan berbagai aktivitas yang diselenggarakan di sekolah ?
 - Apabila jawaban a adalah YA, bagaimana mekanisme pendanaan yang telah berjalan selama ini ?

- c. Apabila jawaban a adalah **TIDAK**, apa yang telah dilakukan dan bagaimana pihak sekolah dapat membiaya pengelolaan sekolah selama ini ?
- d. Apakah ada inovasi-inovasi/pemikiran baru yang telah disumbangkan komite sekolah atau pihak sekolah sendiri dalam hal penggalian dana untuk segala kegiatan persekolahan ?
- e. Apabila pihak sekolah tidak lagi diberi bantuan BOMM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu) atau bahkan mungkin belum menerima dana/subsidi dari pemerintah / Dinas Pendidikan Nasional, upaya-upaya apa yang akan ditempuh untuk tetap dapat menyelenggarakan konsep/model pendidikan MPMBS ini ?
4. Program MPMBS pada dasarnya ditujukan untuk menjadikan sekolah sebagai sebuah institusi yang otonom (mandiri) dan memiliki fleksibilitas serta membutuhkan partisipasi dari semua pihak sehingga dapat menjadi sekolah yang efektif. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka :
- a. Apakah para warga di sekolah (kepala sekolah, guru, pegawai sekolah, serta murid) mendapat hasil yang positif dari interaksinya dengan komite sekolah (atau kalau belum berinteraksi secara intens dengan komite sekolah, apakah MPMBS membawa perubahan positif/lebih baik pada upaya pengelolaan sekolah yang lebih otonom)?
- b. Jika **YA**, apa saja yang secara positif didapatkan para pelaku atau aktor di sekolah dari komite sekolah ?
- i. Hal-hal yang secara positif diperoleh kepala sekolah dengan adanya komite sekolah :.....
 - ii. Hal-hal yang secara positif diperoleh guru dengan adanya komite sekolah :
 - iii. Hal-hal yang secara positif diperoleh murid dengan adanya komite sekolah :
 - iv. Hal-hal yang secara positif diperoleh petugas administrasi/karyawan sekolah dengan adanya komite sekolah :
- Jika **TIDAK**, apa saja yang secara positif diperoleh sekolah dari pelaksanaan MPMBS ?
1. Hal-hal yang secara positif diperoleh kepala sekolah dengan diterapkannya MPMBS:.....
 2. Hal-hal yang secara positif diperoleh guru dengan diterapkannya MPMBS:
 3. Hal-hal yang secara positif diperoleh murid dengan diterapkannya MPMBS :
 4. Hal-hal yang secara positif diperoleh petugas administrasi/karyawan sekolah dengan diterapkannya MPMBS :
- c. Apakah dengan diperolehnya nilai-nilai positif tersebut, dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas dari kepala sekolah,